

PUBLIC POLICY

Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis

VOLUME 3 No. 1 Maret 2022

ISSN 2721-1673 (Cetak)

ISSN 2721-1681 (Online)



LPPM STIA SAID PERINTAH

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>



Implementasi Pelaksanaan Program PPPK menurut UU No. 5 Tahun 2014

Mastina Maksin & Fiqri Akbaruddin Hadi (1-15)

Determinant of Fraud Detection on Financial Statement

Rahma Satya Masna Hatuwe, Muhammad Nur Deni Musa, Saling & La Ode Marihi (16-26)

The Impact of Brand Reputation, Brand Equity and Brand Competence on Brand Loyalty

Muhajer Makatita, Mohamad Amin & Herman Surijadi (27-41)

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pembinaan Prestasi Atlet

Frederika Rahanra & Tarsisius Sarkol (42-51)

The Effect of Financial Literacy, Life Style, Financial Attitude and Locus of Control
to Financial Management Behavior

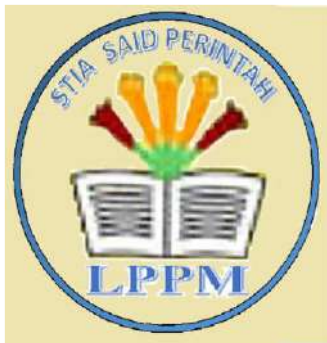
Amila Syaliha, Entar Sutieman, Muhamad Ridwan Pasolo & Victor Pattiasina (52-71)

Perkawinan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuulu

Johan Tanamal & Lodewyk Nahuway (72-90)

Mastina Maksin¹⁾
Fiqri Akbaruddin Hadi²⁾

**^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Panca Marga Probolinggo
mastinamaksin@upm.ac.id**



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No. 1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

In today's era, employee welfare is very important. Because with the welfare of employees, it can improve the quality and quality of the employees themselves in an agency or company. Often we still find problems in the field regarding the welfare of employees, such as temporary employees. There are still many honorary employees who do not feel or enjoy the welfare of their hard work. Especially in areas and in remote areas. Therefore, the central government in order to accommodate the aspirations of honorary employees and civil society, the government created a program for non-PNS ASN (State Civil Apparatus) employees, namely the PPPK Program. It is hoped that this program will be able to improve the welfare of the community and provide a sense of calm in the community for their lives. The Probolinggo City Government is one of the cities in Indonesia that has begun to select and implement the PPPK program in the scope of its personnel. This is reflected, in 2019, the Probolinggo City Government recruited PPPK. The PPPK program is an implementation of the regulation of Law No. 5 of 2014. The PPPK program or also called Government Employees with Work Agreements, every ASN with PPPK status gets the same rights and facilities as civil servants. PPPK has the same obligations and rights as civil servants with civil servant status. It is hoped that this journal will be able to provide broad and specific knowledge of the PPPK program, especially within the Probolinggo City Government.

Keywords : PPPK, Welfare, Employees, Regulations.

Pendahuluan

Tingkat Kesejahteraan pegawai sangatlah penting karena dengan adanya kesejahteraan dan kemakmuran, dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari pegawai itu sendiri di dalam sebuah instansi maupun perusahaan. Jika kita cermati, peraturan undang-undang yang mengatur pegawai PPPK serta PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada undang-undang menyebutkan bahwa hak hak yang dimiliki PPPK serta PNS, bedanya PPPK tidak menerima pensiun seperti PNS. Undang-undang juga menyebutkan syarat pengangkatan PPPK dengan dapat sebuah gaji yang adil serta layak, upah yang diserahkan sesuai dengan kompetensi kerja, resiko pekerjaan serta tanggung jawab. PPPK mendapatkan jaminan sesuai dengan undang-undang dan memberikan peluang untuk mengembangkan kompetensi dan dievaluasi oleh jabatan yang berwenang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara Diangkat oleh Inspektorat Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan ("Simak 5 Perbedaan PPPK dan PNS, Hak Cuti hingga Gaji Halaman all - Kompas.com," 2021). Berdasarkan Tahun 2018 PP Nomor 49 Tentang Peraturan Pasal 1(3) tentang Penatausahaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

"Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) , Mereka diangkat oleh pejabat yang berwenang nantinya akan diberikan tugas didalam suatu jabatan sesuai bidangnya dan diberikan upah berupa gaji yang sudah diatur dalam perundang-undangan" ("Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 – KPU DIY," 2015).

Dengan adanya program baru ini diharapkan oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi pegawai honorer, khususnya yang ada di daerah tertinggal maupun terpelosok. Program ini juga mulai diterapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dalam implementasi di lapangan. Menurut teori implementasi George C. Edward, Edward III (Subarsono, 2011) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu dalam pelaksanaannya sukses atau tidaknya sangatlah dipengaruhi oleh komunikasi. Karena dengan komunikasi dapat berjalannya penyampaian informasi atau pesan dari atasan ke anggota.

- b) Sumberdaya, dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya yakni objek pendukung atau pelaksana dari implementasi kebijakan yang juga dapat berupa sumber daya finansial maupun sumber daya manusia.
- c) Disposisi, yaitu merupakan tindak lanjut dari penyampaian yang disampaikan oleh atasan kepada anggota untuk segera dilaksanakan sehingga apa yang diharapkan dapat segera tercapai.
- d) Struktur Birokrasi, dalam implementasi kebijakan tersebut peranan struktur birokrasi jugalah penting, karena dengan struktur birokrasi yang jelas dan terstruktur dapat menghasilkan output yang sesuai diinginkan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada dua jenis pegawai ASN yang pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS dan yang kedua untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh atasan pada saat melaksanakan perjanjian kerja, maka PNS harus berstatus kepegawaian nasional dan memiliki nomor induk pegawai dan PPPK merupakan salah satu pegawai dari bagian kepegawaian yang didasari oleh perjanjian kerja, yang dimaksud perjanjian kerja yakni seberapa lama ia bekerja menjadi ASN. Seperti 1-3 tahun dalam masa kerjanya dan ia diberikan upah gaji yang setara dengan PNS yang mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur yakni UU No 5 Tahun 2014 (Artisa, 2015).

Penerapan UU tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi tenaga honorer yang selama ini merasa tidak menerima keadilan. Jika kita perhatikan pada Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan c. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat 3 diatur bahwa

"Selain pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berhak mengangkat pegawai tidak tetap".

Kuncinya pada saat melakukan rolet pemerintah, pejabat yang berwenang berhak mengangkat pegawai tidak tetap, pegawai tersebut disebut pegawai honorer, untuk mengangkat beban kerja pegawai negeri dan keperluan lainnya, selama tidak sesuai dengan undang-undang (Saputro, 2015).

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PPPK sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah kesejahteraan yang terdapat di lapangan khususnya

saat ini yang masih banyak menjadi pegawai honorer. Oleh karena itu peneliti menjelaskan bagaimana pelaksanaan program PPPK di Kota Probolinggo dengan titik Implementasi Pelaksanaan Program PPPK Menurut UU No 5 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya program PPPK ini yang dilaksanakan di Kota Probolinggo dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Kota Probolinggo.

Kerangka Teoritis

Implementasi

Implementasi menurut Sulistyastuti, (1991) merupakan suatu aktivitas atau suatu kegiatan untuk mengedarkan hasil strategi yang dilakukan oleh pelaksana ke pertemuan tujuannya sebagai upaya untuk memahami suatu pengaturan kebijakan. Menurut Guntur Setiawan dalam Mulyasa, (2013), implementasi merupakan sesuatu aktivitas yang diatur dan juga diselesaikan secara bersungguh-sungguh sangat tergantung pada standar tertentu untuk menggapai suatu tujuan tindakan. Dengan cara ini, implementasi tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh pasal khususnya program pendidikan. Sementara implementasi menurut Mulyadi, (2016), mengacu pada aksi atau tindakan untuk memenuhi suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu pilihan. Tindakan ini berupaya untuk mengganti suatu keputusan-keputusan tersebut menjadi suatu contoh fungsional dan berupaya untuk mencapai perubahan signifikan atau perubahan kecil seperti sebagaimana yang sudah dipilih tadinya.

Pegawai

Menurut A.W.Widjaja, (2006) bahwa jika pegawai adalah seorang tenaga kerja manusia secara jasmani dan rohani(mental dan psikis) yang diinginkan dan menjadi bekal dalam usaha gotong-royong guna mencapai keinginan bersama (organisasi). Musanef, (1984) menyatakan bahwa pegawai adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan yang tujuannya yaitu mendapatkan upah berupa gaji dan berupa bonus yaitu tunjangan dari instansi ia bekerja yaitu pemerintah maupun badan swasta. Pendapat lain oleh Logemann (Muchsan, 1982) mengungkapkan bahwa jika bersifat substansial yang melihat hubungan antara negara dan pegawai negara yang memiliki hubungan otoritas dengan negara. Jadi

menurut pandangan saya pegawai adalah sekelompok orang yang bekerja disuatu organisasi dan diberikan upah berupa gaji karena telah melakukan kewajibannya.

Konsep PPPK beserta Hak dan Kewajiban

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan pembagian tersebut maka UU ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak, yaitu PPPK.

Hak dan Kewajiban PPPK

Sebagai bagian dari aparatur Negara, PPPK memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur didalam Undang-Undang. Hak-hak yang diperoleh dapatkan oleh PPPK ditulis dalam uu ASN pasal 22, hak yang berisi (Mahaputra, Wairocana, & Satyawati, 2014);

- a) Gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan;
- b) Mendapatkan hak dalam pengambilan cuti;
- c) Mendapatkan bantuan dan jaminan, seperti bantuan hukum Jaminan yang berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kematian;
- d) Pengembangan kompetensi yang diadakan setiap tahun oleh instansi pemerintah.

Selain Hak PPPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajibannya diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berisi tentang;

- a) Memiliki sikap setia dan patuh kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintahan yang sah secara hokum (konstitusi);
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah disusun oleh pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan;
- d) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melakukan sebuah pekerjaan kedinasan yang dilandaskan dengan kejujuran, kesadaran, dan memiliki pengabdian dan tanggung jawab yang tinggi agar pekerjaan berjalan sesuai yang diinginkan;

- f) Memiliki sikap yang berintegritas tinggi dan keteladanan dalam bentuk perilaku maupun sikap, ucapan dan tindakan baik saat berdinis maupun diluar kedinisan;
- g) Harus bisa menutupi identitas jabatan dan hanya dapat memberikan penjelasan identitas jabatan jika diminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebagai pemeriksaan dengan strategi atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2015). Metode penelitian secara deskriptif kualitatif berfokus kepada analisis data yang disajikan secara kualitatif oleh peneliti. Penelitian secara deskriptif kualitatif membuat peneliti lebih dapat leluasa dalam menyampaikan dan menyajikan data dengan kalimat yang terbuka dan luwes. Metode penelitian kualitatif juga disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta artiker yang diteliti (Kristi P, 2015).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan berbagai informasi, khususnya strategi pemilihan informasi yang digunakan oleh peneliti adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang diarahkan dengan memahami buku atau majalah dengan sumber informasi yang berbeda di perpustakaan (Chamidah, 2018).

Pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan informasi melalui literatur, seperti buku, berita, jurnal-jurnal yang sesuai dengan stema yang ada dibagian pembahasan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan juga memudahkan kita sebagai peneliti untuk mendapatkan materi tanpa terjun ke lapangan terlebih saat ini kondisi masih Pandemi Covid-19. Pada proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data-data dan informasi melalui sumber jurnal-jurnal, portal berita dan website pemerintah. Untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti mengumpulkan data melalui portal berita yang terintegrasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Progam PPPK Sebagai Salah Satu Upaya Bagi Persoalan Tenaga Honorer Berbasis Seleksi

Pimpinan pegawai kepresidenan Moeldoko menyebut Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK adalah jalan keluar untuk permasalahan honorer berbasis seleksi. Moeldoko menyebut seleksi tersebut mengedepankan sistem skema merit. Seleksi skema merit merupakan prasyarat dasar pada pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut sama dalam penyeleksian TNI, Polri yang telah berbasis seleksi profesional. Moeldoko juga mengungkapkan pemerintah memahami bahwa sekarang ini masih ada honorer berdinis tak berkedudukan dan berwenang yang pasti. Lantaran hal tersebut pemerintah bertopang sistem PPPK pula bisa sebagai cara dalam pemecahan honorer berlandaskan seleksi, berfundamental skema merit ("Pemerintah Jelaskan Alasan PPPK Jadi Solusi Tenaga Honorer | Republika Online," 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, PPPK bekerja minimum 1 tahun serta dapat diperpanjang sangat lama 30 tahun. Hal tersebut berdasarkan kondisi dan situasi. Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PPPK ialah masyarakat negara Indonesia yang penuh keadaan eksklusif yang dinaikan dari perjanjian kerja buat jangka waktu tertentu pada rangka penerapan tugas pemerintahan.

merdeka.com

Beda Honorer dan PNS Kontrak

	Honorer	Kontrak
 Perekrutan	Pemda bisa rekrut tanpa izin pemerintah pusat (tidak diatur dalam UU ASN)	Sesuai mekanisme dan regulasi (ada tes)
 Pengangkatan	Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah.	Diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu
 Sumber Gaji	Dari APBN maupun APBD didasarkan pada alokasi anggaran di satuan kerja	Dari APBN maupun APBD didasarkan peraturan perundang-undangan
 Skema Gaji	Diatur sesuai UU berlaku secara nasional	Berdasarkan alokasi anggaran satuan kerja
 Tunjangan	Tidak ada tunjangan	Berdasarkan golongan dan masa kerja
 Karir	Di pemerintah pusat akan dihapus pada 2025 sesuai PP Nomor 49 Tahun 2019.	Bisa menduduki jabatan administratif maupun fungsional

Gambar 1. Beda Honorer dan PNS Kontrak

Sumber: Merdeka.com/3 Desember 2020

Secara universal, honorer dan PPPK mempunyai persamaan yaitu keduanya dipekerjakan pada instansi pemerintah pusat dan wilayah. Keduanya juga berkedudukan non-PNS. Tetapi dalam penggambaran dan penerimaan honor keduanya berbeda. PPPK direkrut dari perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dengan rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, PPPK termasuk ASN non PNS sehingga dapat menempati jabatan administratif dan jabatan fungsional pada instansi pemerintah. PPPK direkrut pejabat Pembina kepegawaian dan dihgaji dari peraturan perundang-undangan. Selain honor, PPPK juga mendapatkan tunjangan, honor, dan bepergian tugas yang telah direncanakan bersumber pada standar bayaran masukan yang dirancang Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Total pendapatan diluar upah PPPK tadi seluruhnya adalah kekuasaan kelembagaan pemerintah yang merekrut PPPK. Total honor dan subsidi PPPK diurus

pada Perpres No 98 Tahun 2020. Jumlahnya dilandaskan kelompok dan masa kerja kelompok. Lalu PPPK bisa menerima peningkatan honor berkala atau sempurna yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan. Keputusan peningkatan honor berkala atau peningkatan honor sempurna sama halnya yang diartikan lebih lanjut pada Peraturan Menteri yang mengusahakan urusan pemerintah di bidang pemberdayagunaan aparatur negeri ("Mengupas PPPK, Pegawai Pemerintah Gajinya Setara PNS | merdeka.com," 2020).

Alur Pendaftaran PPPK

Pelaksanaan program PPPK terbagi menjadi dua, yaitu PPPK Non-Guru dan PPPK Guru. PPPK Non-Guru dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d. 21 Juli 2021 (BKN, 2021). Jika PPPK Guru dimulai pada tanggal 2 s.d. 16 Desember 2021 (Kemendikbudristek, 2021).



Gambar 2. Alur Pendaftaran CPNS & PPPK 2021

Sumber: Triponnews.com/19 Maret 2021

Terdapat pula alur dan tahapan pendaftaran yang harus pendaftar perhatikan semacam:

1. Awal pendaftar harus pendaftaran Akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Pada tahapan awal ini berikut beberapa penjelasannya;
 - a) Sehabis pendaftar masuk dibagian depan taman sscasn.bkn.go.id, pendaftar bisa slide yang bergulir;
 - b) Bagian tersebut menunjukkan pendaftaran buat CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK;

- c) Sehabis itu, pendaftar tentukan opsi pada PPPK sehabis itu klik "Catatan Saat ini";
 - d) Buat mengubah slide dan memilah PPPK bisa dengan mengklik ciri panah di bagian ujung kanan slide maupun kiri slide;
 - e) Silahkan catatan akun di website formal pendaftaran PPPK terlebih dahulu biar diarahkan ke ssp3k.bkn.go.id;
 - f) Apabila laman sudah tampak sepenuhnya Kamu tinggal mencari menu catatan akun. Kunjungi dan ikuti prosedur pendaftarannya;
 - g) Pendaftar harus mencermati dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan;
 - h) Nomor Anggota Uji K-II (bagi Honorer K2), simak petunjuk pendaftarannya;
 - i) Pengisian Bertepatan pada lahir;
 - j) No NIK, No KK maupun NIK Kepala Keluarga;
 - k) Alamat email aktif, password, dan perkara keamanan;
 - l) Cocok Gambar resmi dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB(format. JPG maupun. JPEG;
 - m) Tahapan pembuatan akun dari web [ssp3k bkn](http://ssp3k.bkn.go.id) dikatakan berakhir bila sudah menerbitkan Kartu Informasi Akun, lalu cetak kartunya buat untuk lanjut ke tahap berikutnya.
2. Mengisi Informasi Formulir Pendaftaran Online
- Berkas registrasi PPPK/ P3K 2021 bisa diakses lewat sistem online dengan metode masuk di laman SSP3K dengan mencantumkan NIK serta kata sandi yang sudah terbuat.
- a) Sehabis pendaftar login, Kamu bisa mengisi segala informasi pendaftaran dan penuh sebagian dokumen.
 - b) Nantinya pendaftar harus mengirim dokumen tersebut dengan syarat pendaftaran PPPK 2021.
 - c) Sebagian dokumen yang butuh diisi oleh calon anggota antara lain:
 - d) Unggah Gambar diri sembari memegang KTP dan Kartu Informasi Akun.
 - e) Memilah jabatan dan penuh riwayat Pendidikan.
 - f) Penuhi biodata pendaftaran PPPK Online.
 - g) Mengirim dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan instansi).
 - h) Mengecek informasi data yang sudah diisi pada formulir resume.

- i) Mencetak Kartu Pendaftaran.
3. Menunggu Hasil Verifikasi
Hasil pengisian informasi yang sudah berakhir, hendak terkirim ke panitia. Calon anggota kembali menunggu verifikasi buat mengecek berkas maupun dokumen-dokumen yang telah diunggah. Hasil verifikasi ini ialah pengumuman pilih administrasi. Hanya anggota PPPK/ P3K yang lulus bisa menjajaki uji pilih PPPK 2021 nantinya.

Implementasi Pelaksanaan Progam PPPK di Lingkup Pemkot Probolinggo



Gambar 3. Probolinggo Kota Mulai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru CASN

Sumber; (Memontum.com/30 September 2021)

Pada hari Kamis (30 September 2021) di Kota Probolinggo telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Non-Guru Calon Aparatur Sipil Negara(CASN). kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung GOR Kedopok Jalan Mastrip. Seleksi tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.236 peserta, yang terdiri dari CASN 1.132 dan PPPK Non-Guru 130 peserta. Kegiatan tersebut juga didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Probolinggo yaitu Bapak Wahono Arifin, tak hanya dari unsur pemkot namun unsur regional Surabaya juga datang meninjau langsung kegiatan tersebut yakni Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Heru Purwaka.

Menurut Pak Wahono Arifin kegiatan seleksi tersebut dilaksanakan dengan betu-betul dipersiapkan dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan ("Probolinggo Kota Mulai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru CASN -

Memontum.Com," 2021). Beliau juga mengharapkan dengan pelaksanaan seleksi tersebut, dapat menyaring dan menyeleksi calon pegawai ASN yang nantinya akan menempati posisi-posisi penting lingkup Pemkot Probolinggo dan nantinya diharapkan ASN yang lolos tersebut memiliki integritas, berkualitas dan berakhlak. Pelaksanaan PPPK di Kota Probolinggo tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menampung aspirasi tenaga honorer yang masih belum mendapatkan kesejahteraan sehingga dengan adanya program PPPK menjadi salah satu solusi bagi permasalahan tersebut. Jumlah pegawai di kelurahan se-Kota Probolinggo sebanyak 278 orang yang terdiri atas 178 orang laki-laki dan 100 orang perempuan. Jumlah pegawai PNS yang terdata di Kantor Kecamatan yakni sebanyak 103 orang. Namun jumlah pegawai Honorer hanya terdapat 3 orang saja.

Berikut data jumlah pegawai PNS dan PPPK di Kota Probolinggo yang terdapat dimasing-masing kecamatan tahun 2019 (Diskominfo, 2019) yaitu;

**Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Honorer
di Kantor Kecamatan Kota Probolinggo 2018**

Kecamatan		Pegawai Negeri Sipil		Honorer		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Kademangan	11	11	-	-	22
2.	Kedopok	16	5	-	-	21
3.	Wonoasih	14	8	1	-	23
4.	Mayangan	8	7	1	-	16
5.	Kanigaran	15	8	1	-	24
Jumlah		64	39	3	-	106

Sumber; Masing-Masing Kantor Kecamatan

Kesimpulan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hak dan kewajiban seperti PNS dengan perbedaan yakni terletak pada pensiun. Pegawai PPPK tidak mendapat pensiun dan masa kerjanya telah diatur seperti 1 tahun masa kerja hingga 30 tahun masa kerja tergantung perjanjian dengan institusi yang diikutinya. PPPK diangkat untuk suatu jabatan tertentu dan melaksanakan tugas jabatan itu menurut undang-undang. PPPK yang diangkat oleh negara akan menjalankan tugas jabatan dan dibayar sesuai golongan dan jam kerja golongan.

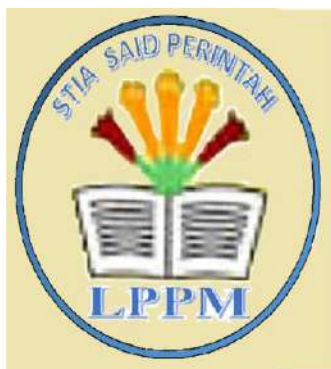
Proses dan alur seleksi pegawai diawali yaitu proses pendaftaran, yang mencakup pendaftaran melalui website sscasn.bkn.go.id, lalu yang kedua yaitu pengisian formulir data diri pendaftar dan pengumpulan berkas-berkas yang di syaratkan. Jika sudah peserta dapat menunggu hasil verifikasi data. Lalu pada tahapan seleksi, peserta akan mengikuti seleksi sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan dan diinformasikan. Kegiatan seleksi pegawai PPPK juga dilaksanakan di Kota Probolinggo.

Pada hari Kamis (30 September 2021) di Kota Probolinggo telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Non-Guru Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung GOR Kedopok Jalan Mastrip. Seleksi tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.236 peserta, yang terdiri dari CASN 1.132 dan PPPK Non-Guru 130 peserta. Kegiatan tersebut juga didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Probolinggo yaitu Bapak Wahono Arifin, tak hanya dari unsur Pemkot namun unsur regional Surabaya juga datang meninjau langsung kegiatan tersebut yakni Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Heru Purwaka.

Daftar Pustaka

- A.W.Widjaja. (2006). *Administraasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Artisa, R. A. (2015). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Review terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–42.
- BKN. (2021). *SE BKN Nomor 5587 Tahun 2021*.
- Chamidah, Y. (2018). *KEPEMIMPINAN PRESIDEN WANITA (Studi Komparasi Batshul Masail dan Majelis Tarjih)*.

- Diskominfo, P. K. (2019). *DATA STATISTIK SEKTORAL KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019*.
- Kemendikbudristek. (2021). PPPK Guru Kemdikbudristek.
- Kristi P. (2015). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 UI.
- Mahaputra, A. B., Wairocana, I. G. N., & Satyawati, N. G. A. D. (2014). *Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (Asn) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. 1–5.
- Mengupas PPPK, Pegawai Pemerintah Gajinya Setara PNS | merdeka.com. (2020).
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Musanef. (1984). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 – KPU DIY. (2015).
- Pemerintah Jelaskan Alasan PPPK Jadi Solusi Tenaga Honorer | Republika Online. (2018).
- Probolinggo Kota Mulai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru CASN - Memontum.Com. (2021).
- Saputro, D. A. (2015). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 4.
- Simak 5 Perbedaan PPPK dan PNS, Hak Cuti hingga Gaji Halaman all - Kompas.com. (2021).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi."* Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyastuti, P. dan. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No. 1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Determinant of Fraud Detection on Financial Statement

Rahma Satya Masna Hatuwe ¹⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Buru

Mohammad Nur Deny Musa ²⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Buru

Saling ³⁾

Universitas Yapis Papua

La Ode Marihi ⁴⁾

Universitas Yapis Papua

mohnur.denymusa@gmail.com

Abstract

This study was a replication of conceptual model of empirical studies aimed to analyze the effect of professional skepticisms, auditor experience, competency, independence and time pressure on the fraud detection of financial statement. The result of this study was expected to be able reducing the gap among the so many empirical studies existing. This study could be categorized as explanatory research. The samples in this study were all the auditors in BPKP Maluku and Papua consisting of 88 auditors. The analysis tool used was multiple linear regression analysis with questionnaire instrument as data collection instrument.

The result of this study showed that; professional skepticism and auditors experience hand significant impact on the author ability in detecting fraud on financial statement, competence and independence of auditors had not significant effect on the auditors ability in detecting fraud and time pressure affected the auditors ability in detecting fraud but it was not significant.

Keywords : Professional Skepticisms, Auditor Experience, Competency, Independence, Time Pressure, Fraud Detection

Introduction

Fraud, generally can be classified into 3 forms, namely; corruption, the misuse of organization assets and financial statement fraud in which the actors can come from various circles in organization. The survey by Transparency International stated that Indonesia is one of the highest corruption cases country in the world (Noch, Pattiasina, Seralurin, & Ratag, 2019). They stated that Indonesia has 38 out of 100 and is in position of 39 from 180 countries (Sania Mashabi, 2019). The other survey by *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia in 2016 cooperates with P3K2P STIE Perbanas Surabaya stated that the highest fraud form in Indonesia was corruption, 67% cases, followed by company assets exploitation 31% and the smallest was financial statement fraud, 2% (Association of Certified Fraud Examiners, 2016). In detail, Nahuway Victorio Fernando & Tamaela Eduard Yohannis, (2020) said that the corruption cases occurred mostly in commodity and service commercial field.

A factor potentially affects the fraud is professional skepticism (Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, 2018). PSA number 4 year of 2011, stated that professional skepticism is the auditor attitude who think critically on the audit evidence by continuously questioning and disbelieving the evidence. The empirical study by Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, (2018) demonstrated that the auditors ability to detect fraud was affected significantly by professional skepticism. This is supported by Anggriawan, (2014); Indrawati, Cahyono, & Maharani, (2019) and Safira Indriyani, Lukman, (2021) who also stated that professional skepticism had positive impact on fraud detection. However, those studies are contradict with the study by Ranu & Merawati (2017) showing that professional skepticism had no effect on the auditor ability in fraud detecting.

The other factor potentially affecting the author ability in detecting fraud is the author experience (Ranu & Merawati, 2017 and Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, (2018). It means that the experienced auditors tend to be able detecting the indication of fraud and giving the suitable solution. Nevertheless, it is contrary to Supriyanto, (2014), he found that the ability to detect fraud is not affected by auditors experience.

The next factor potentially affected fraud detection is competence (Silalahi, 2013; Ramadhani, 2015; Julio Herdi Peuranda, 2019). Competence can be defined as qualification the auditors have to do the auditing properly. The qualification in this case can be the

educational background formally or informally and also the auditors experience. Evidence from Ramadhani, (2015) showed that the ability of detecting fraud is affected by auditors competence. However, the study above is contrary to the result of Atmaja Didi, (2016) who stated that competence had no impact on the author ability in detecting fraud.

The next factor is the auditors independence (Ramadhani, 2015). Independence is an absolute thing owned by an auditor. An independent auditor is believed to have honesty, integrity, objectivity, good mental and physic and absolutely he is not easy to be influenced by others in giving audit opinion. Former study by Ramadhani, (2015) found that independence had significant effect on auditors ability in detecting fraud. However, this study must be re-verified because the study by Sandi Prasetyo, (2015) showed different thing.

Besides the factors mentioned above, time pressure, in fact, tends to affect auditors ability in detecting fraud (Molina, 2018). Heriningsih (2002) in Molina, (2018) stated that time pressure in auditing is a condition where the auditors get pressure to finish the auditing. Study by Molina, (2018) showed that time pressure had impact on the auditors ability in detecting fraud, while Dandi Voedha, (2017) showed the contradiction.

The evidences above express that professionalism, experience, competence, independence, and time pressure are not the absolute factors affecting the auditors ability in detecting fraud, since there are found contradict studies. Therefore, there is ambivalence of the research result that must be re-examined in order to minimize the ambivalence. This is the reason motivating the writer to carry replication study. This study was expected to add contribution in explaining the determinant effect of auditor ability in detecting fraud on financial statement (professional skepticism, auditors experience, auditors competence auditor independence, and time pressure).

Theoretical Framework and Hypotheses

Fraud Detection

Trinanda (2016) stated that an ability that an auditor have to have is the ability to detect fraud whether in from corruption, assets exploitation, or financial statement fraud.

Professional Skepticism

Professional Skepticism is the auditor personal trait related to critical thinking on the audit evidence by frequently questioning and proving the evidence. The empirical study by Anggriawan, (2014); Indrawati, Cahyono, & Maharani, (2019) and Safira Indriyani, Lukman, (2021) showed that the auditors ability in detecting fraud was affected significantly by professional Skepticism. In the other hand, the study by (Ranu & Merawati, 2017) show different result

H1 ; Professional skepticism had positive effect on the auditors ability in detecting fraud

Auditors Experience

Experience is a factor supporting auditors ability. It means that an experienced auditor tends to be more capable to detect fraud indication and also give suitable solution (Ranu & Merawati, 2017 and (Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, 2018). However, study by Supriyanto, (2014) found that the auditors ability in detecting fraud was not affected by buy the auditors experience.

H2 ; Experience positively affect the auditors ability in detecting fraud

Auditors Competence

Competence can be defined as qualification required by an auditor to do auditing properly. The qualification in this term can be from the formal or informal education, and also the auditor experience. Study by Ramadhani, (2015) showed that the auditors ability in detecting fraud was affected by auditors competence. However, a study by Atmaja Didi, (2016) found that competence had no impact on auditors ability in fraud detection.

H3 ; Competence positively affect auditors ability in fraud detection

Independence

Independence is absolutely a must as an auditor. An independent auditor is perceived to be honest, fair, objective, and having good physic and mental, he is not easily influenced by others in giving his audit opinion. Independence also means that the existence of honesty within the auditor in considering facts and the existence of an objective, impartial considerations within the auditor in formulating and expressing his opinion (Pattiasina, Noch, Surijadi, Amin, & Tamaela, 2021).

A former study by Ramadhani, (2015) showed that independence had positive impact on the auditors ability in detecting fraud. Nevertheless, this finding must be re-examined since the finding by Sandi Prasetyo, (2015) showed a contradicting result

H4 ; Independence had positive effect on the auditors ability in detecting fraud

Time Pressure

Time pressure is the condition where the auditors get pressure to finish his task on time. research by Molina, (2018) showed that time pressure affected the auditor ability in detecting fraud whereas a study by Dandi Voedha, (2017) showed different thing.

H5 ; Time pressure positively affect the auditors ability in detecting fraud

Research Methodology

This study was classified as explanatory research which aimed to explain the effect of the variables being researched. The samples in this study were all the auditors in Maluku and Papua Province consisted of 88 auditors. The analysis tool used was multiple linear regression with online questionnaire as data collecting technique.

Result and Discussion

Instrument Testing

The instrument testing in this research consisted of validity and reliability testing. The validity testing applied the comparison of Product Moment Person correlation index with 5% significance and the reliability testing applied alpha cronbachs coefficient as the measurement of the item reliability.

Instrument Testing Result

Variable	Validity			Reliability	
	Pearson Corelation	Probabilitas (Sig)	Note	Alpha Cronbachs	Note
Professional Skepticisms	0.874	0.000	Valid	0.946	Realibel
	0.884	0.000	Valid		
	0.954	0.000	Valid		
Auditor Experience	0.865	0.000	Valid	0.910	Realibel
	0.801	0.000	Valid		
	0.883	0.000	Valid		
Competency	0.945	0.000	Valid	0.975	Realibel
	0.950	0.000	Valid		
	0.965	0.000	Valid		

Variable	Validity			Reliability	
	Pearson Corelation	Probabilitas (Sig)	Note	Alpha Cronbachs	Note
Independence	0.830	0.000	Valid	0.927	Realibel
	0.871	0.000	Valid		
	0.922	0.000	Valid		
Time Pressure	0.923	0.000	Valid	0.950	Realibel
	0.880	0.000	Valid		
	0.924	0.000	Valid		
Detecting Fraud	0.750	0.000	Valid	0.871	Realibel
	0.787	0.000	Valid		
	0.859	0.000	Valid		

The result of validity and reliability testing showed that all the variables are valid and reliable, so that the next analysis could be carried out.

Classic Assumption Testing

Classic Assumption Testing consisted of; normality testing through normal probability plot graphic by looking at the trend of data spreading toward the regression line. The result of data analysis showed that the dots scattered around the diagonal line and the spreading followed the diagonal line, so the data spreading was normally distributed. The next testing was heteroscedasticity testing through scatter plot graphic. The result showed that the dots scattered randomly and scattered over and below 0 point on Y axis which showed that there no heteroscedasticity occurred. The next testing was Multicollinearity testing by looking at the value of Variance Inflation Factor (VIF) and tolerance. The result showed that the VIF value was smaller than 10 and the Tolerance value was nearly 1 meaning that there was no multicollinearity among independent variables.

The Result of Multiple Linear Regression Analysis

Multiple linear regression was carried to see the impact of professional skepticism, experience, competence, independence, and time pressure on the auditors ability in detecting fraud whose result can be seen as follow.

The Result of Multiple Linear Regression Analysis

Variable	Coefficients	t calc.	Sig.	Note
Professional Skepticisms	0.718	12.563	0.000	Significant
Auditor Experience	0.217	2.635	0.010	Significant
Competency	0.024	0.333	0.740	Not significant
Independence	0.032	0.546	0.587	Not significant
Time Pressure	0.097	1.710	0.091	Not significant

Variable	Coefficients	t calc.	Sig.	Note
Adjust R Square	0.719			
F calc	45.434		0.000	

Discussion

The Effect of Professional Skepticism on the Auditors Ability in Detecting Fraud

Based on the result of partial testing it can be seen that professional skepticism had value of $t_{\text{calc}} 12.563 > 1.66365$ ($t_{\text{calc}} > t_{\text{table}}$) with positive direction, and the significant score $0.000 < 0.05$. Based on the result, the first hypothesis stated that there was impact of professional skepticism on the auditor ability in detecting fraud was accepted (H_a was accepted and H_o was rejected). This showed that the higher the professional skepticism an auditor had, the higher the ability he had in detecting fraud, so the probability of fraud would be smaller (Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, 2018). This finding is relevant to the finding by Mokoagouw et al. (2018) which showed that professional skepticism affect the auditor ability in fraud detection.

The Effect of Experience on the Auditors Ability in Detecting Fraud

The analysis result showed that auditors experience had $t_{\text{calc}} 2.635 > t_{\text{table}} 1.66365$ with positive direction, and significance value $0.010 < 0.05$. Based on this analysis, the second hypothesis was accepted, which stated that there are effect of experience on the auditors ability in detecting fraud (H_a was accepted and H_o was rejected). This showed that experience would affect sensitivity of auditors of the fraud indications. So, in detecting fraud, adequate experience is required to maximize and ease the detection (Atmaja, 2016).

The Effect of Competence on the Auditors Ability in Detecting Fraud

The analysis result showed that competence had value of $t_{\text{calc}} 0.333 < t_{\text{table}} 1.66365$ with positive direction, and the significance value $0.740 > 0.05$. it meant that the third hypothesis stated that there is no effect of competence on the authors ability in detecting fraud was rejected (H_a was rejected, and H_o was accepted). This finding stated that competence could not guarantee the quality of auditors in detecting fraud. This is relative since the fraud actors might carry their crime in more sophisticated way which require specific competence to detect the fraud (Atmaja Didi, 2016). This finding is relevant to the study by Atmaja, (2016) which showed that competence was not really affected the auditors ability in detecting fraud.

The Effect of Independence on the Auditors Ability in Detecting Fraud

The analysis showed that independence had the value of $t_{\text{calc}} 0.546 < t_{\text{table}} 1.66365$ with positive direction, and significance value $0.546 > 0.05$. Therefore, the fourth hypothesis was rejected, which means independence had no effect on the auditors ability in detecting fraud (H_a was rejected, and H_o was accepted). In other words, if the auditor could not hold their independence, there would be potential for the auditors to ignore the fraud. Bribing case from the institution being audited could cause the biased opinion of the auditors. This is relevant to the finding by Prasetyo, (2015) which showed that independence had no effect on the auditors ability in detecting fraud.

The Effect of Time Pressure on the Auditors Ability in Detecting Fraud

The analysis showed that time pressure had the value of $t_{\text{calc}} 1.710 > t_{\text{table}} 1.66365$ with positive direction, and the value of significance was $0.091 > 0.05$. This meant that the fifth hypothesis stating that there was effect of time pressure on the auditors ability in detecting fraud was accepted (H_a was accepted and H_o was rejected). This showed that the higher the time pressure given, the higher the ability of the auditors in detecting fraud (Molina, 2018). This finding is relevant to the study by Molina & Wulandari, (2018) which showed that the time pressure had impact on the auditors ability in detecting fraud.

Conclusion

Based on the elaboration above, some conclusions can be drawn, they are;

1. Professional Skepticism and experience significantly affected the auditors ability in detecting fraud.
2. Competence and independence had no significant effect on the auditors ability in detecting fraud.
3. Time pressure affected but was not significant on the auditors ability in detecting fraud.

Recommendations

Based on the conclusion above, there are some recommendations the author could give, they are;

1. Further study is expected to enlarge the object of the study not only in BPKP of Maluku Province but also in BPKP institution in other province.

2. Further research is also needed to add other variables potentially affect the auditors ability in detecting fraud like job responsibility, personality type, interpersonal communication, and also by using interview technique to avoid the possibility of subjectivity of respondents in answering the questionnaire.

Reference

- Anggriawan, E. F. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud (Studi empiris pada KAP di DIY). *Jurnal Nominal*, *III*(2), 101–116. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/2697/2250>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Survey Fraud Indonesia 2016*. Retrieved from acfe-indonesia.or.id
- Atmaja Didi. (2016). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mendeteksi Fraud Dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Sebagai Variabel Moderasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *16*(1), 53–68. Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/mraai/article/view/2078/2141>
- Dandi Voedha. (2017). "Pengaruh Beban Kerja, Pelatihan dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Bpk RI Perwakilan Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *4*(1), 11–25.
- Indrawati, L., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi Auditor dan Pelatihan Audit Kecurangan Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *International Journal of Social Science and Business*, *3*(4), 393–402. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21496>
- Mokoagouw, Monica, Lintje Kalangi, & N. G. (2018). *Pengaruh skeptisme profesional dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan (Survei pada auditor BPK RI perwakilan Sulawesi Utara)*. *13*(2), 261–272.
- Molina, & S. W. (2018). Pengaruh Pengalaman, Beban Kerja dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, *16*(2), 43–55. Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/akunna/article/view/435/336>

- Nahuway Victorio Fernando & Tamaela Eduard Yohannis. (2020). *Model Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Pengguna di Provinsi Maluku*. 9(1), 81–87. Retrieved from <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/327>
- Noch, M., Pattiasina, V., Seralurin, Y., & Ratag, F. (2019). Non-ethical Behaviour Mediates Relationship of Rules Obedience, Management Morality, and Effectiveness of Internal Monitoring System towards Accounting Fraud Tendency. *DLSU Business & Economics Review*, 28(3). <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288826>
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Surijadi, H., Amin, M., & Tamaela, E. Y. (2021). The relationship of auditor competence and independence on audit quality: An assessment of auditor ethics moderation and professional commitment. *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.32400/iaj.31289>
- Ramadhani. (2015). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Komunikasi Interpersonal Auditor KAP Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *JOM Fekon*, 2(2), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9047/8713>
- Ranu, G. A. Y. N., & Merawati, L. K. (2017). Kemampuan Mendeteksi Fraud Berdasarkan Skeptisme Profesional, Beban Kerja, Pengalaman Audit Dan Tipe Kepribadian Auditor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 79–90. Retrieved from <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JUARA/article/view/649/600>
- Safira Indriyani, Lukman, H. (2021). Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional dan Time Pressure Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 113–120. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JAGo/article/view/8167/4978>
- Sandi Prasetyo. (2015). Pengaruh Red Flags, Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan yang Terdaftar di IAPI 2013). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8146/7817>
- Sania Mashabi. (2019, January 23). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40. *Kompas.Com*. Retrieved from

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40>

- Silalahi, S. P. (2013). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Situasi Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor. *Jurnal Ekonomi*, 3.
- Supriyanto. (2014). Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe Kepribadian dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA; Vol. 2014). Retrieved from https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Ausir.salford.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha
- Trinanda, H. H. (2016). Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta) Competence Against Auditor ' S Ability To Detect Fraud (Empirical Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Profita*, 3(1), 1–20.

Muhajer Makatita ¹⁾

STIA Said Perintah

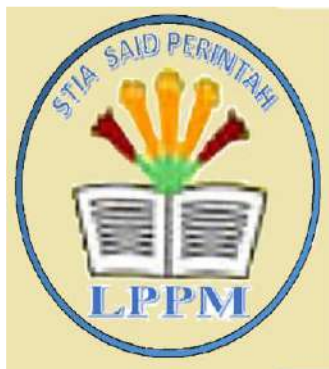
Muhammad Amin ²⁾

STIA Said Perintah

Herman Surijadi ³⁾

Politeknik Negeri Ambon

hermansurijadi@yahoo.co.id



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No. 1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The aims of this study were to test and analyze the impact of reputation, equity and brand competence to the handphone brand loyalty in Ambon city. The Population in this study were all the handphone users in Ambon City. The sampling technique used in this study was purposive sampling which took 75 respondents matched with the criteria. Multiple linier regression was used to analyze the data.

The result showed that the variable of reputation, equity, and brand competence had positive and significant impact on the handphone brand loyalty in Ambon City. This can be proven through the regression coefficient of reputation, equity, and brand competence in which if the score of reputation, equity, and brand competence improves, the score of loyalty will also improve. Therefore, it can be said that the improvement of reputation, equity, and brand competence will improve the loyalty of handphone brand in Ambon City.

Keywords : Brand Reputation, Brand Equity, Brand Competence, Brand Loyalty

Introduction

Study by Nielsen Media Research revealed that the growth of phone users is very high, especially in big cities. The survey was taken in eleven areas including Jakarta, Botabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Gerbangkertasila, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang and Denpasar, in which the respondents were chosen by the age of above 10 years old and household basis (<http://www.marketing.co.id/hp-tumbuh-fixed-line-turun/>).

The phenomena of massive phone users was also being searched by SurveyOne which showed that the fast growth of handphone accounts in Indonesia in this last five years. (<http://www.marketing.co.id/hp-tumbuh-fixed-line-turun/>). Cipta Media Seluler also carried a survey on the necessity stage II on January 16 to February 15 2014. The result showed that the handphone users mostly owned by mothers, children and the elders. Their necessity of information was about education, health, children development, and daily practical information for family.

Those realities will surely become vital attention by the handphone industries. Interestingly, the business actors must attempt to build good image especially about their products. This is very important because brand is a promise given by the producers to deliver series of feature, benefit, and service to the consumers (Eduard Yohannis Tamaela & Herman Surijadi, 2015). A brand of a product has a strong relation with the quality of a product which finally become the power of the forming of consumers loyalty (Campbell, L. dan Finch, 2003).

Brand is a consistence and holistic promise and can be the company tool to enter the business competition. An important thing for the company related to the brand is the attempt to build the loyalty of the consumers (Yesawich, 1997; in Bowen, JT, and Chen, (2001). This is because of the rapid change in environment, the growth of global competition, the sudden appear of innovative products, the saturation of market condition. All those phenomena become tough challenges of marketers (Eduard Yohannis Tamaela, 2015).

There are so many concepts define "Brand" effectively and get the consumers trust and loyalty. Lau, Geok Theng and Lee, (1999) stated that trust to a brand is the willingness of the consumers to put belief on a brand with the whole risks because there are expectations promised by the brand in giving positive outcome to the consumers. They also

said that there are three main factors forming trust on a brand, namely: brand characteristics, company characteristics, and the characteristics of brand and consumers relation.

This study focused on handphone, which is categorized as high involvement product. The consumers who wish to buy high involvement product tend to evaluate brand more detail and comprehensively. These kind of consumers seek for detail information on the brand they want to have actively. In the other hand, low involvement consumers occurs when consumers give lack involvement on finding the information about certain brand. In Indonesia, there are many scientific study investigating the loyalty determination on brand. Muhammad Rizan, Basrah Saidani, (2012) said that brand image or reputation had positive and significant effect on brand loyalty. Nila Kasuma Dewi, (2012) revealed the same result that brand image had significant impact on consumers loyalty. This result is also supported by several studies by Kaisupy, (2017); Mahmood et al., (2018); Astono, Astuti, & Respati, (2021) and Dewi Aurora Mikasari and Agung Edy Wibowo, (2021).

In fact, the results described above cannot be justified that brand equity and reputation absolutely have impact on brand loyalty. It can be seen from the empirical study by Oskar Sepriadi, Dahliana Kemener, (2012) which stated that brand reputation had no significant impact on loyalty. This is also supported by Mochammad Edris, (2012). His study showed that brand reputation had no significant impact on brand loyalty.

Other empirical study by Kurnia & Mukhtar, (2000) stated that brand equity had positive and significant impact on costumers loyalty. In line with Alamsyah, (2013) brand equity had significant impact partially to the costumers loyalty. Abas Bambang dan Meyzi Heriyanto, (2017); Kaisupy, (2017) and Wicaksana, Suharyono, & Hidayat, (2018) stated the similar result. However, Mahmood et al., (2018) found different result. They said that brand equity had no significant impact on brand loyalty.

The other brand loyalty determinant, brand competence had been researched by several researchers in di Indonesia. Mochammad Edris, (2012) through his study stated that brand competence had impact on brand loyalty. This is supported by Kaisupy, (2017); Astono, Astuti, & Respati, (2021) and Dewi Aurora Mikasari dan Agung Edy Wibowo, (2021). Contrary to Agil Putra Shandi, (2011), he said that brand competence had no significant impact on brand loyalty.

From various empirical study described previously about the tree factors, it is explicitly showed that some had impact on brand loyalty and some had not which by Ferdinand, (2006) it is said as research gap. Contradiction, difference, or research gap from the above studies were then be developed in this study with the aim to analyze the impact of reputation, equity and brand competence to the handphone brand loyalty in Ambon city.

Theoretical Framework and Hypothesis

Brand Loyalty

Brand loyalty has been conceptualized as actual pattern of shopping act on a certain brand (Brown, 1952; Tucker, 1964 cited by Lau, Geok Theng and Lee, (1999) or behavioral intention to buy certain brand and persuade others to buy the brand (Banks, 1968 in Lau, Geok Theng and Lee, (1999). On industrial marketing, trust on salesperson or leads to loyalty on supplier. It means that when consumers believe on a certain brand, bigger positive buying intention on the brand is likely to happen. According to Basu Swastha Dharmmesta, (1999) there are four stages of loyalty based on attitudinal and behavioral approach. They are cognitive, affective, conative and behavior loyalty.

Brand Reputation

Brand reputation is consumers perception about their knowledge of a brand and others opinion to the brand. Brand reputation can be developed through advertisement and public relation or can be affected by the quality of product and brand performance. Cred and Miles, (1996) in Lau, Geok Theng and Lee, (1999) found that certain group will drive to positive expectation of other group which comes from the development of reciprocal relationship among groups.

The result of empirical study by Muhammad Rizan, Basrah Saidani, (2012) showed that brand image or reputation had positive and significant effect to the brand loyalty. Nila Kasuma Dewi, (2012) also revealed the same result. Several supporting studies also had carried by; Kaisupy, (2017); Mahmood et al., (2018); Astono, Astuti, & Respati, (2021) and Dewi Aurora Mikasari dan Agung Edy Wibowo, (2021). However, the results of the above studies are contrary to studies by; Oskar Sepriadi, Dahliana Kemener, (2012) and Mochammad Edris, (2012) which showed that brand reputation had nothing to do with the

brand loyalty. Therefore, based on the theory and the studies stated above the writer came up with the hypothesis as follow;

Hypothesis₁ : Brand reputation had positive impact on brand loyalty of handphone product.

Brand Equity

Generally, brand equity is defined as the impact of unique marketing of a brand. In this case there is certain outcome of product marketing since there is a brand name on the product (Keller, 1993). So, brand equity is value added to a product because of a brand name given to it (Yoo, Donthu, & Lee, (2000)). Srivastava and Shocker, (1991) in Lisa Wood, (2000) defines brand equity as the sum of three things namely; all the attitude and behavior in consumers mind, distribution channel and the person who give influence which will increase the benefit in the future and cash flow in long time period.

The result of other study by Kurnia & Mukhtar, (2000) stated that brand equity had positive and significant impact toward costumers loyalty. This is in line with Alamsyah, (2013), he stated that brand equity had partial significant to the costumers loyalty. This result is also supported by several studies by; Abas Bambang dan Meyzi Heriyanto, (2017); Kaisupy, (2017); and Wicaksana et al., (2018). However, Mahmood et al., (2018) has succeeded in proving different result that brand equity had no significant effect to the brand loyalty. Based on the theory and the studies above, the hypothesis proposed was;

Hypothesis₂ : Brand equity had positive impact on brand loyalty of handphone product.

Brand Competence

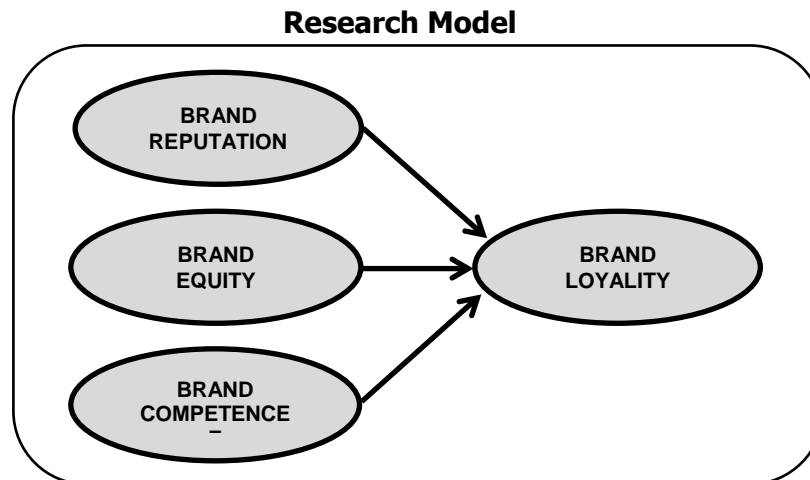
Brand competence is the ability of a brand to solve consumers problem (Lau, Geok Theng and Lee, (1999)). Skin and Roth, (1993) as cited by Lau, Geok Theng and Lee, (1999) stated that the ability of a brand is an important element influencing the consumers in trusting a brand. The consumers is able to know the brand competence through these two ways, namely; direct usage of the brand, and word-of-mouth communication.

Mochammad Edris, (2012) in his study he stated that brand competence had influence on the brand loyalty. This is also supported by Kaisupy, (2017); Astono, Astuti, & Respati, (2021) and Dewi Aurora Mikasari dan Agung Edy Wibowo, (2021). However, study by Agil Putra Shandi, (2011) showed different result. He stated that brand competence had

no significant impact on Brand loyalty. Based on the theory and studies delivered above, the hypothesis offered was;

Hypothesis₃ : Brand competence had positive impact on brand loyalty of handphone product.

Based on theoretical studies and support from previous studies, the framework of this research model is as shown below.



Research Method

This research is categorized as explanatory study since it tried to explain the effect of brand reputation, brand equity, and brand competence on the brand loyalty. This study used quantitative approach, and the model of the research is survey in which questionnaire was used as instrument. The population in this study are all handphone users in Ambon. Non probability sampling was used because there was no accurate information of the right numbers of the users. The technique of sampling used was purposive sampling with these three criteria; 1) the respondents who had bought handphone several times in Ambon city 2) the respondents in Ambon who had never bought handphone other than current brand they used. The final samples based on these criteria were 75 respondents. The analysis applied was descriptive statistics with frequency distribution of respondents answer and inferential statistics through multiple linier regression analysis which was carried with instrument testing and classic assumption testing namely; normality testing, multicolinearity testing and heteroscedasticity testing.

Result and Discussion

Frequency Distribution of Respondents Answer

The result testing of descriptive statistic of respondents answer by using mean index was shown as follow.

Frequency Distribution of Respondents Answer

No.	Variables	Total Sample	Average
1.	Brand Reputation	75	3.61
2.	Brand Equity	75	3.72
3.	Brand Competence	75	3.57
4.	Brand Loyalty	75	3.79

The analysis test of respondents answer of all research variables were each measured by four statements. The result was range from 3.57 to 3.79 meaning that all the variables can be described well or it can be justified that all respondents agreed with all the statement of the variables in this research.

Instrument Testing

Research instrument testing carried were validity and reliability testing. Validity testing in this study used was Product Moment Person correlation, where the validity of instruments could be known by comparing correlation index with 5% significant value. This means that if probability of correlation is smaller than 0.05, the instrument is not valid; and vice versa if the correlation result is bigger than 0.05, the instrument is valid (Ferdinand, (2006). While the reliability testing in this study applied alpha cronbachs, where an instrument can be said reliable if it has coefficient value bigger or equal to 0.5 which means if $\alpha = 0.5$ the instrument can be said reliable (Ferdinand, 2006). The result of the instrument testing is showed as follow.

Validity and Reliability Testing

Variable	Items	Corelation	Result	Alpha Cronbach	Note
Brand Reputation (X ₁)	X _{1.1}	0.805	Valid	0.772	Reliabel
	X _{1.2}	0.709	Valid		
	X _{1.3}	0.842	Valid		
	X _{1.4}	0.719	Valid		
Brand Equity (X ₂)	X _{2.1}	0.834	Valid	0.820	Reliabel
	X _{2.2}	0.764	Valid		

Variable	Items	Corelation	Result	Alpha Cronbach	Note
Brand Competence (X ₃)	X _{2,3}	0.845	Valid	0.841	Reliabel
	X _{2,4}	0.784	Valid		
	X _{3,1}	0.890	Valid		
	X _{3,2}	0.884	Valid		
	X _{3,3}	0.812	Valid		
Brand Loyalty (Y)	X _{3,4}	0.701	Valid	0.872	Reliabel
	Y _{1,1}	0.875	Valid		
	Y _{1,2}	0.804	Valid		
	Y _{1,3}	0.888	Valid		
	Y _{1,4}	0.850	Valid		

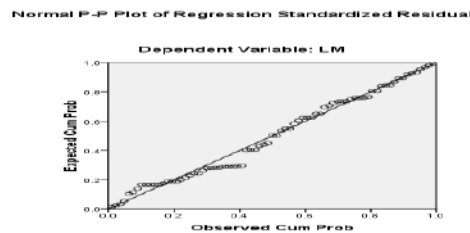
The result of validity and reliability testing of the instrument above shows that the result of correlation testing is bigger than 0.5 and the value of alpha cronbach's coefficient is above 0.50 thus the variable on each question is valid and reliable to be used in data analysis.

Classic Assumption Test

Normality Test

Normality test on the data in this research applied normal probability plot graphic by seeing the data spread inclining toward the regression line. The normal probability plot graphic is shown bellow.

Normal P- Plot Graphic

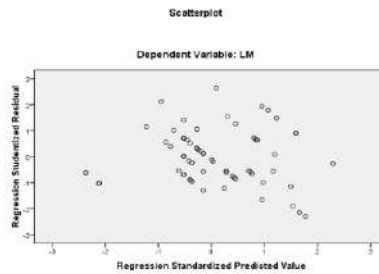


Normal probability plot graphic above shows that data spread around diagonal line and the spreading follows the diagonal line, so that the data spreading is normally distributed, thus multiple linear regression can be applied.

Heteroscedasticity Test

Priyatno, (2012) stated that a good regression model should not have heteroscedasticity. Heteroscedasticity testing in this study was by seeing the spread of the dots on the scatterplot graphic as presenting below.

Scatterplot Graphic



The scatterplot graphic above shows that the dots spread randomly upper and below the zero point on Y axis. This means that the heteroscedasticity in this research is fulfilled.

Multicollinearity Test

Multicollinearity testing in this study was taken through detection whether or not multicollinearity occurred by seeing the value of Variance Inflation Factor (VIF). If the VIF value is bigger than 10, the multicollinearity occurs and if the VIF value is smaller than 10, there is no multicollinearity. The multicollinearity testing is presented as follow.

Multicollinearity Testing

Models	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Brand Reputation	0.226	4.424
Brand Equity	0.410	2.441
Brand Competence	0.247	4.048

The data on the table above shows that the value of VIF is smaller than 10 and the *Tolerance* value is close to 1 which means there is no multicollinearity occurs among independent variables in this research.

Multiple Linear Regression Analysis

The result of multiple regression analysis was used to analyze the impact of brand reputation, brand equity and brand competence to the brand loyalty which shown as follow.

Multiple Linear Regression Analysis Testing

Variable	Standardized Coefficients	t calc	Sig	Note
Constant	1.738			
Brand Reputation	0.552	3.620	0.001	Significant
Brand Equity	0.829	8.260	0.000	Significant
Brand Competence	0.481	3.934	0.000	Significant
F_{calc}	61.116		0.000	Significant
t_{table}	1.667			
Adjusted R Square	0.709			

The Impact of Brand Reputation on the Costumers Loyalty

This research reveals that brand reputation has positive and significant impact to the level of brand loyalty. This is proven by the significance value of 0.001 which means smaller than 0.005 ($0.001 < 0.05$) and the t_{table} value 1.667 which is smaller than t_{calc} 3.620 ($1.667 < 3.620$) with the regression coefficient 0.552 which means that brand reputation is verified to give positive and significant on the level of brand loyalty of the handphone users in Ambon city. The result of the data analysis is reinforced with descriptive statistic testing namely distribution of respondents answer about brand reputation showing that majority of loyal costumers Ambon city stated that the handphone they have has good brand reputation.

This finding shows that the consumers tend to choose handphone product based on the brand reputation, especially when they have no experience on certain category of a product they never buy. They tend to believe on the famous and favorite brand. The consumers often think that famous brand makes best product and worth to have because of the quality guaranty, reliability, and better service. Brand advertising supports the costumers to know the product quality by developing and keeping the positive image of the brand in their mind.

This finding support the previous studies by Muhammad Rizan, Basrah Saidani, (2012); Nila Kasuma Dewi, (2012); Kaisupy, (2017); Mahmood et al., (2018); Ari Astono, Astuti, & Respati, (2021) and Dewi Aurora Mikasari and Agung Edy Wibowo, (2021) stating that brand reputation has positive and significant impact on the brand loyalty.

Impact of Brand Equity on the Costumers Loyalty

The research result reveals that brand equity has positive and significant impact on the level of brand loyalty. This is proven by the value of significance 0.000 which is smaller than 0.005 ($0.000 < 0.05$) and the value of t_{table} 1.667 that is smaller than t_{calc} 8.260 ($1.667 < 8.260$) with regression coefficient 0.829 meaning that brand equity has positive and significant impact on the loyalty of handphone users in Ambon city. The result of data analysis is supported by descriptive statistics data about brand equity that shows the majority of handphone users in Ambon city stated that the brand of handphone they are using now is better than the previous brand.

This finding shows that brand equity can increase the probability of a brand to be chosen, which leads to brand loyalty and be able to protect the brand from the market competition. The marketing focus on the brand equity becomes important because the consumers nowadays continuously evaluate a brand and company after buying certain product, if the performance of the product bad or the service given by the company of related brand disappointed, the consumers will find it dissatisfaction. The impact is that the company will lose the chance to create brand loyalty and the loyal consumers.

This finding is in line with the finding by Kurnia & Mukhtar, (2000) who stated that brand equity has positive and significant impact on the costumers loyalty. It is also similar to previous study by Halni and Alamsyah, (2013) that equity of a brand has significant impact partially on the consumers loyalty. This finding also supports the study by; Abas Bambang and Meyzi Heriyanto, (2017); Kaisupy, (2017); and Wicaksana et al., (2018) who also stated that brand equity has positive and significant impact on loyalty.

The Impact of Brand Competence on the Costumers Loyalty

This study found that brand competence has positive and significant impact on the level of brand loyalty. It is proven by the significance value 0.000 which is samller than 0.005 ($0.000 < 0.05$) and the t_{table} 1.667 which is smaller than t_{calc} 3.934 ($1.667 < 3.934$) with the regression coefficient 0.481 which means that brand competence has positive and significant impact on the loyalty of the customers or handphone users in Ambon city. The data analysis is supported by the descriptive statistic test of the distribution of respondents answer about brand competence proving that the majority of loyal customers of handphone

brand in Ambon city agreed that the brand of handphone they are using can fulfill their necessity better than other brand.

This finding verifies the statement of Lau, Geok Theng and Lee, (1999) that the ability of a brand in this case is brand competence become an important element affecting the consumers in trusting a brand. Moreover, if the product is handphone which is included in high involvement category in which the decision making of consumers to be loyal on the brand is not an instant decision, it needs as much information as possible that assures them to keep loyal on the brand. Other study delivered by Mochammad Edris, (2012); Kaisupy, (2017); Astono, Astuti, & Respati, (2021) also Dewi Aurora Mikasari and Agung Edy Wibowo, (2021) who also succeeded to prove that brand competence had impact on the brand loyalty.

Conclusion and Recommendation

Conclusion

Based on the analysis before, it can be concluded that brand reputation, brand equity, and brand competence has been proven partially to have impact on customers loyalty of handphone product in Ambon city positively and significantly, which means if the perception of brand reputation, brand equity, and brand competence of the customers improves, the brand loyalty will also improved. Therefore, it can be justified that the stimulus of the improvement of brand reputation, brand equity, and brand competence will be followed by the improvement of loyalty level of the handphone users Ambon city.

Recommendation

The recommendation the researcher can give is; in the effort to keep the level of loyalty and to avoid disloyal behavior of the handphone users, the handphone company must keep on doing the innovation on the product attribute since the technology keeps on developing and the customers demand become higher. It is recommended because based on the descriptive analysis through frequency distribution of respondents answer which stated that the statement with the lowest score was on item on brand competence variable, more exactly on item $X_{3.1}$ and $X_{3.2}$ (related to the reliability and the performance of handphone product). So that, innovation related to both issues is needed. It must be appropriate with the nowadays demand and the customers must become the priority of the

handphone company. Recommendations for future research is to add moderating variables such as lifestyle and consumer engagement to analyze the impact on brand loyalty. This recommendations about modification of future research model will have an impact on the development of consumer learning theory.

Reference

- Abas Bambang dan Meyzi Heriyanto. (2017). Pengaruh Brand Equity dan Brand Trust Terhadap Loyalitas Konsumen Mobil Merek Toyota Kijang Innova (Survey Konsumen pada Dealer PT. Agung Automall Cabang Sutomo Pekanbaru). *JOM FISIP*, 4(2), 1–11. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15549>
- Agil Putra Shandi. (2011). *Analisis Dimensi Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek Pengguna Kartu Indosat IM3 di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Alamsyah. (2013). *Analisis Pengaruh Ekuitas Merek dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada RS Syarif Hidayatullah)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Astono, A. D., Astuti, W., & Respati, H. (2021). The Effect of Reputation And Competence on Customer Loyalty Through Customer Trust. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship*, 1(2), 90–99. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v6n5p6>
- Basu Swastha Dharmmesta. (1999). Loyalitas Pelanggan; Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan Bagi Peneliti. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3), 73–88. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39434/22323>
- Bowen, JT, and Chen, S. (2001). The Relationship between Customer Loyalty and Customer Satisfaction. *International Journal of Contemporary Hospitality*, 13(5), 213–217. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/228362539>
- Campbell, L. dan Finch, E. (2003). Customer Satisfaction and Organisational Justice. *ProQuest Science Journals Facilities*, 22(7/8), 178–189.
- Dewi Aurora Mikasari dan Agung Edy Wibowo. (2021). Reputasi Merek, Kompetensi Merek, Kesukaan Merek dan Kepercayaan pada Perusahaan Terhadap Loyalitas Merek Apotek Vitka Farma. *Jurnal Postgraduate Management*, 1(1), 14–25. Retrieved from <http://ojs3.lppm-uis.org/index.php/PMJ/article/view/125>
- Eduard Yohannis Tamaela. (2015). Determinan Dimensi Kepercayaan Merek Terhadap

- Keputusan Pembelian Kaos Merek Gagartang di Kota Ambon - PDF. *Benchmark*, 4(1), 48–61. Retrieved from https://www.academia.edu/42295768/Determinan_Dimensi_Kepercayaan_Merek_Terhadap_Keputusan_Pembelian_PDF
- Eduard Yohannis Tamaela & Herman Surijadi. (2015). Pengaruh Atribut Produk dan Pencarian Variasi Terhadap Perilaku Perpindahan Merek Handphone Merek Nokia dan Blackberry ke Samsung Galaxy Series - PDF. *Benchmark Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 3(2), 49–62. Retrieved from <http://www.solopos.com>
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen; Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen (2nd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaisupy, T. D. (2017). Dampak Reputasi, Kompetensi, Kemampuan Memprediksi dan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Merek. *Jurnal Ilmu Ekonomi Advantage*, 1(6), 1–8. Retrieved from <https://unidar.e-journal.id/jadv/article/view/63>
- Keller, K. . (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, *Journal of Marketing*, 57, 1–22. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1252054?origin=crossref>
- Kurnia, F., & Mukhtar, Y. (2000). Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Produk Pocari Sweat di Kota Padang. *Ejurnal.Bunghatta*, 1–15. Retrieved from <https://adoc.pub/pengaruh-kepercayaan-merek-terhadap-loyalitas-merek-studi-ka.html>
- Lau, Geok Theng and Lee, S. H. (1999). Consumer Trust in Brand and The Link to Brand Loyalty,. *Journal of Market Focused Management*, 4, 341–379. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009886520142>
- Lisa Wood. (2000). Brands and Brand Equity: Definition and Management. *Management Decision*, 38(9), 662–669. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00251740010379100/full/html>
- Mahmood, T., Qaseem, S., Ali, Q. M., Ali, H. F., Humayon, A. A., & Gohar, A. (2018). The Impact of Brand Identification, Brand Equity, Brand Reputation on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand Affect in Pakistan. *Business and Management Research*, 7(4), 46–52. <https://doi.org/10.5430/bmr.v7n4p46>

- Mochammad Edris. (2012). Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek (Studi Pada Detergen Merek Rinso di Kabupaten Kudus). *Jurnal Analisis Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus*, 1–13. Retrieved from <https://adoc.pub/pengaruh-kepercayaan-merek-terhadap-loyalitas-merek-studi-ka.html>
- Muhammad Rizan, Basrah Saidani, Y. S. (2012). Pengaruh brand image, brand trust Terhadap Brand Loyalty the Botol Sosro. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 1–17. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrmsi/article/view/772/681>
- Nila Kasuma Dewi, G. A. dan S. Y. (2012). Pengaruh Iklan, Citra Merek dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand And Body Lotion di Kota Padang (Studi Kasus di PT. Unilever Cabang Padang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 11–29. Retrieved from <http://blog.ub.ac.id/dinaandri/files/2013/03/Jurnal-Manajemen-dan-Kewirausahaan.pdf>
- Oskar Sepriadi, Dahliana Kemener, N. H. (2012). *Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan dan Reputasi Merek Terhadap Loyalitas Penumpang CV. Tranex Mandiri*. Universitas Bung Hatta.
- Priyatno, D. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Wicaksana, T. A., Suharyono, & Hidayat, K. (2018). Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei pada Pengguna Sepeda Motor Merek Honda Beat di Sarana Kartika Motor Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 63(1), 74–81. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/801373>
- Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). an Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(2), 195–211. <https://doi.org/10.1177/0092070300282002>

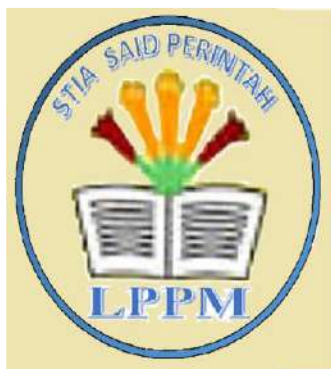
Frederika Rahanra ¹⁾

STIS Tual

Tarsisius Sarkol ²⁾

STIS Tual

tarsisiussarkol88@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No. 1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Sports problems seen in Southeast Maluku Regency, namely government policies have not touched the substance of sports development. This writing focuses on coaching athlete achievement. This study aims to evaluate government policies in fostering athlete achievement in Southeast Maluku district. The population in this study were the KONI administrators of Southeast Maluku Regency and the Sports Manager of the Athletics Branch of Southeast Maluku Regency. This research will be analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that the coaching of athletes, coaches and sports branch managers is inconsistent, the availability of sports infrastructure is still minimal, the budget allocation is limited each year, the coaching money is not accompanied by consistent assistance. Therefore, it is recommended that the Southeast Maluku district government and the local KONI Management, as well as the Sports Branch Management are more consistent in coaching athletes and coaches to achieve achievements.

Keywords : Policy, Coaching, Athlete Achievement

Pendahuluan

Prestasi olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu satu dekade terakhir tidak memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan belum ada prestasi yang tergolong besar mengharumkan nama daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan prestasi ini disebabkan oleh perencanaan, pembinaan dan pengembangan yang cenderung kurang maksimal.

Masalah olahraga yang terlihat di Kabupaten Maluku Tenggara yakni bersumber dari kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan, hanya saja belum menyentuh substansi pembinaan olahraga. Hal ini terlihat dari minimnya fasilitas pendukung olahraga seperti gelanggang olahraga atau *sport center*, kesejahteraan bagi atlet dan pelatih berupa bonus ataupun uang pembinaan, kurangnya profesionalisme pemain dan pelatih dalam bidang olahraga dan yang terpenting adalah minimnya alokasi anggaran.

Harapan masyarakat Maluku Tenggara adalah adanya kebijakan pemerintah daerah dalam merubah sistem pembinaan atlet, mengalokasikan anggaran pembinaan, membangun fasilitas pendukung olahraga, serta adanya pembinaan bagi pelatih (Ahmad Hendra Dana 2014). Focus kajian ini lebih ke pembinaan atletik di Maluku Tenggara yang didalamnya termasuk cabang lompat jauh, lompat gala, lempar cakram, lempar lembing dan tolak peluru. Selain itu, lari jarak pendek, jarak jauh, dan estafet.

Alasan mendasar pemilihan fokus kajian tersebut karena banyak bibit-bibit atlet Maluku Tenggara yang memiliki kemampuan pada cabang atletik. Apalagi, dengan kondisi masyarakat Kei yang memiliki ketahanan tubuh kuat. Namun, pemerintah daerah belum konsisten membina atlet dan memfasilitasi atlet mengikuti kejuaraan atau perlombaan di tingkat regional dan nasional. Prestasi olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kurun waktu satu dekade terakhir sangat tidak memuaskan. Belum ada prestasi yang mengharumkan nama daerah.

Menurut penulis, telah banyak penelitian berkaitan kebijakan pemerintah dibidang olahraga pada sejumlah daerah. Akan tetapi, khusus untuk penelitian berkaitan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dibidang olahraga tergolong masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa literatur karya ilmiah baik yang publikasi secara *offline* dan *online*. Penelitian ini juga, fokus pada pembinaan atlet terkhusus cabang atletik. Oleh karena itu, melalui hasil penelitian ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

mendapatkan sumbangsih akademis demi evaluasi kebijakan pemerintah daerah terutama dalam memajukan bidang olahraga.

Kerangka Teoritis

Definisi Pembinaan sebagaimana Yurudik Yahya mengatakan suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, rasa dan karsa (Yahya 2018). Definisi pembinaan dikemukakan Yahya tersebut, kata pembinaan diartikan sebagai "pendidikan". Artinya bahwa, pembinaan merupakan pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa. Dengan kata lain, pembinaan atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Sedangkan definisi prestasi ada beragam pengertian, salah satunya definisi prestasi oleh para ahli dari Belanda yang diartikan sebagai hasil bisnis. Dalam arti yang lebih luas maka untuk mencapai prestasi dibutuhkan kemampuan emosional, spiritual, intelektual, dan ketahanan dalam menghadapi perjalanan situasi kehidupan

Adapun jenis-jenis prestasi yang sering ditemui yang salah satunya prestasi bidang olahraga. Beberapa jenis prestasi diantaranya prestasi kerja, adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan. Beberapa contoh prestasi kerja seperti promosi kerja keras mereka selama bertahun-tahun, penerimaan penghargaan artistik oleh seorang seniman, ataupun pencapaian penyanyi atau bentuk lain dari seniman. Selain itu, adapula penghargaan untuk aktivis lingkungan hidup yang dinilai telah menyelamatkan lingkungan. Penghargaan diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai melakukan konservasi lingkungan seperti penanaman pohon atau penghijauan. Sementara itu, prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi olahraga. Prestasi ini diperoleh dari hasil kerja keras dan usaha di bidang olahraga. Sebagai contoh, seorang atlet mendapat medali emas ditempat pertama diraih saat menghadiri Pekan Olahraga Nasional (PON).

Istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris bila diterjemahkan sebagai kebijakan. Istilah ini menjadi pembedah untuk istilah "*wisdom*" yang diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan istilah "*virtues*" yang diterjemahkan sebagai kebajikan. Bila istilah kebijaksanaan berasal dari

kata "*wisdom*" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam, sebaliknya kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan (Islamy 1999).

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "pemerintah" (anonim, 2019). Kata pemerintah berasal dan kata "perintah". Perintah memiliki 3 makna yaitu; (1) menyuruh melakukan sesuatu, (2). pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) dan (3) pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal , urusan dan sebagainya) memerintah (anonim, 2019).

Dalam buku "*Analisis Policy For Public*", yang ditulis Mc. Rae dan, James A. Wilde, keduanya mengemukakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang adalah pengertian kebijakan pemerintahan. Berdasarkan definisi Mc.Rae dan James ini maka pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang, hal itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah (Mc Rae 1967). Definisi Kebijakan pemerintahan juga dikemukakan Thomas R Dye dalam bukunya, "*Understanding Public Policy*". Ia menegaskan, kebijakan pemerintahan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian itu, kemudian menunjukkan apabila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk disuatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini dinamakan kebijakan pemerintahan (Dye 1987).

Pengertian kebijakan pemerintah juga dikemukakan David Easton. Menurutnya, pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat adalah kebijakan pemerintahan. Pengertian Easton ini mengisyaratkan pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai) kebijaksanaan/kebijakan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Easton 1965).

Secara terminologi, kata atletik berasal dari bahasa Yunani dari unsur kata "*athlon*" berarti berlomba atau bertanding. Selain bahasa Yunani, adapula beberapa bahasa diantaranya, "*athletics*" dalam bahasa Inggris, "*Athletiek*" dalam bahasa Belanda, *Athletuque* dalam bahasa Perancis, dan *Ahtletik* dalam bahasa Jerman. (bola.com, 2021). Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis

olahraga fisik, seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Saat ini, atletik menjadi satu diantara olahraga paling umum yang dimainkan diberbagai penjuru dunia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki asumsi bahwa menurunnya prestasi olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara, terutama dibidang atletik karena kebijakan pemerintah dalam hal pembinaan atlit. Pembinaan atlit sejak dini didukung oleh penyediaan sarana prasarana hingga kesejahteraan atlit adalah kunci menyiapkan prestasi bagi cabang olahraga atletik.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian Kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan evaluatif atau evaluasi atas kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini berlokasi di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan pengurus cabang olahraga atletik di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang diperoleh dari lapangan akan didapatkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan Penelitian berasal dari KONI dan pengurus cabang atletik berjumlah 9 informan. Variabel penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah maka peneliti menetapkan indikator-indikator yakni; pembinaan pelatih, pembinaan atlit, pembinaan pengurus olahraga cabang atletik, alokasi anggaran, fasilitas pendukung olahraga, kesejahteraan (*reward*) program olahraga. Hasil pengumpulan data di lapangan dan jawaban informan penelitian menjadi dasar analisa data. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana nantinya datalapangan yang dikumpulkan akan deskripsikan dengan kalimat-kalimat sederhana dan akan diterjemakan kedalam bentuk penjelasan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berawal dari pertanyaan, bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Prestasi Atlet di Kabupaten Maluku Tenggara? Dilapangan peneliti menggali mendalam kebijakan pemerintah melalui indikator yang ditetapkan dalam definisi operasional yakni pembinaan pelatih, pembinaan atlit, pembinaan pengurus olahraga cabang atletik, alokasi anggaran, fasilitas pendukung olahraga, kesejahteraan (*reward*) dan program olahraga.

Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif kualitatif dengan cara menampilkan setiap indikator melalui pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan sehingga jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menjadi pertimbangan untuk menarik kesimpulan umum gunanya untuk menjawab persoalan penelitian. Demikian hasil penelitian berdasarkan wawancara dapat dideskripsikan dibawah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan dari indicator pembinaan atlet memberikan jawaban bahwa tidak ada pembinaan secara kontinu (konsisten). Apabila, ada perlombaan baru dikumpulkan dan dipersiapkan mengikuti perlombaan. Hal ini terungkap dalam wawancara bersama, Plt. Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Maluku Tenggara, J.H. Hukubun. Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan dilakukan jelang perlombaan sehingga para atlet baru dikumpulkan selama sebulan atau dua bulan. Menurut Atlet Lari (Marthen Robetubun) atlet sendiris ecara mandiri berlatih. Sedangkan, pembinaan secara konsisten dalam kesehariaan tidak dilakukan oleh KONI maupun PASI. Pembinaan atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga akan berjalan apabila didukung kebijakan pemerintah dalam hal anggaran. Alokasi anggaran yang dikucurkan bagi cabang olahraga menjadi salah satu kunci kesuksesan menyiapkan prestasi atlet di Kabupaten Maluku Tenggara.

Hasil wawancara bersama Ketua KONI Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen mendukung pengembangan olahraga di daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran tiap tahun. Hasil pengumpulan data penelitian menunjukkan bahwa total alokasi anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kepada KONI kabupaten Maluku Tenggara dalam 3 tahun terakhir bervariasi yakni pada tahun 2018 dana Hibah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tahun 2019 dana hibah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tahun 2020 dana hibah sebesar Rp.700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah).

Salah satu faktor penting terkait prestasi atlet yakni adanya *reward* yang diberikan bagi atlet maupun bagi pelatih yang berprestasi. Pemberian *reward* ini diharapkan memotivasi atlet dan pelatih sehingga kedepan, lebih bergairah dan cenderung berpotensi menjuarai perlombaan baik tingkat daerah, regional, nasional hingga internasional. Para atlet mengaku, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui KONI telah mengalokasikan

anggaran dan ada *reward* yang diberikan bagi atlet yang berprestasi. *Reward* diberikan dalam bentuk uang pembinaan ketika menjuarai perlombaan yang diselenggarakan pemerintah daerah seperti yang diungkapkan oleh atlet (Matheus Fadirubun).

Hal lainnya adalah bahwa seorang atlet tidak akan maju tanpa adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dalam kegiatan latihan. Ada sarana olahraga tetapi terbatas seperti Gedung Serbaguna Larvul Ngabal yang dijadikan Gelanggang Olahraga (GOR) dan stadion Maren untuk pertandingan sepak bola atau lomba atletik Plt. Ketua Pengcab PASI Kabupaten Maluku Tenggara, mengaku pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pendukung salah satunya adalah melalui adanya fasilitas olahraga yakni stadion Maren Langgur. Hanya saja, anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.

Atlet Marthen Robetubun menyarankan agar pemerintah harusnya lebih siap dalam upaya untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga. Kesiapan dilakukan baik berupa pembinaan atlet, pelatih dan cabang olahraga yang harus didukung oleh alokasi anggaran dan sarana prasarana olahraga.

Berdasarkan intepretasi data penelitian menunjukkan bahwa indikator pembinaan atlet, pelatih dan cabang olahraga merupakan kunci utama dalam penyiapan prestasi atlet. Pembinaan atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga, selama ini di Kabupaten Maluku Tenggara belum kontinu (konsisten). Atlet dan juga pelatih harus dipersiapkan sebaik mungkin ketika ada kegiatan olahraga. Sehingga faktor anggaran, sarana prasarana dan kesejahteraan atlet adalah faktor pendukung prestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana masih minim di Kabupaten Maluku Tenggara. Alokasi anggaran tersebut masih terbatas padahal pengurus cabang olahraga yang tersedia dengan struktur yang lengkap. Temuan lainnya bahwa anggaran yang tersedia tersebut selanjutnya harus dibagi untuk program pembinaan, penyediaan fasilitas dan kesejahteraan atlet dan pelatih yang dalam kenyataannya belum memenuhi harapan untuk meningkatkan prestasi atlet.

Harapannya bahwak ebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembinaan prestasi atlet dimasa yang akan datang harus sinkron sejak awal yakni menyiapkan alokasi anggaran bidang olahraga secara konsisten, menyiapkan sarana dan prasarana olahraga, memberikan pembinaan secara kontinu bagi atlet, pelatih dan pengurus

cabang olahraga. Kebijakan pemerintah daerah harus terlihat dengan *event* olahraga secara konsisten diselenggarakan di pemerintah daerah, tetapi juga mengirimkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat regional, nasional bahkan internasional. Kebijakan pemerintah daerah juga harus pada kesejahteraan atlet sebagai motivasi dalam berkarir dibidang olahraga.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembinaan prestasi atlet maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini telah memiliki kebijakan dalam pembinaan prestasi atlet seperti mengalokasikan anggaran untuk bidang olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dan KONI Kabupaten Maluku Tenggara. Penyiapan atlit dilakukan dengan digelarnya beberapa kejuaraan olahraga meski belum konsisten dan adanya *reward* bagi atlet yang berprestasi dalam kejuaraan yang diikuti.

Meski kebijakan sudah nampak terlihat tapi masih terdapat permasalahan 4 permasalahan yang perlu mendapatkan kebijakan pemerintah daerah yakni pertama, pembinaan atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara tidak konsisten. Hal ini terlihat dari minimnya program pembinaan yang dilakukan oleh KONI, Pengcab dan Pemerintah Daerah. Kedua, masih minimnya sarana prasarana olahraga dan saat ini fasilitas tersedia hanya satu stadion dan satu gedung serbaguna. Ketiga, alokasi anggaran tiap tahun terbatas. Terdapat 16 pengurus cabang olahraga dibawah komando KONI Kabupaten Maluku Tenggara. Anggaran harus dibagi untuk program pembinaan, penyediaan fasilitas dan kesejahteraan atlet dan pelatih. Keempat, kesejahteraan atlet ditemukan bahwa sudah terlihat komitmen pemerintah daerah memberi kesejahteraan baik kepada atlet dan pelatih melalui uang pembinaan. Namun, uang pembinaan tersebut tidak disertai dengan pendampingan secara konsiten sehingga prestasi atlet tetap terjaga hingga mengikuti perlombaan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan dalam penelitian ini agar kedepan, Pemerintah Daerah melalui KONI dan Pengurus cabang Olahraga disarankan mulai konsisten melakukan pembinaan atlet dan pelatih termasuk mengatur kembali roda organisasi sehingga terlihat 'sehat'. Pemerintah Daerah mulai menyiapkan sarana prasarana olahraga, terutama cabang atletik yang dikategorikan sebagai cabang berprestasi. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen tinggi untuk kemajuan olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengalokasi anggaran tiap tahun lebih maksimal sehingga didistribusi memenuhi program pembinaan, penyiapan sarana prasarana hingga kesejahteraan pelatih dan atlet. Demi mendorong prestasi atlet maka Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tiap tahun anggaran bagi kesejahteraan atlet dan pelatih berupa uang pembinaan, ketersediaan asrama bagi atlet dan pelatih dan menaikan jumlah bonus ketika atlet berprestasi membawa nama daerah. Seluruh hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah. Namun, penelitian ini perlu dikembangkan dari sisi kebijakan pemerintah untuk penyiapan pembinaan pelatih dan pengelola cabang olahraga sebagai satu kesatuan dalam menyiapkan prestasi olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hendra Dana. (2014). <http://eprints.uny.ac.id/66800/2/Bab%20I.pdf>. Retrieved Mei 2021, 3, from <https://www.google.com/search?q=masalah+pembinaan+prestasi+atlit&oq=masalah+pembinaan+prestasi+atlit&aqs=chrome..69i57j69i59l2j69i60l4.6303j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- anonim. (2019, Maret 20). <https://eprints.umm.ac.id/66607/3/BAB%20II.pdf>. Retrieved Maret 26, 2022, from <https://eprints.umm.ac.id>: <https://eprints.umm.ac.id>
- bola.com. (2021, 21 Februari). <https://www.bola.com/ragam/read/4490173/pengertian-atletik-dan-jenis-jenis-cabang-olahraganya-yang-perlu-diketahui>. Retrieved Maret 26, 2022, from <https://www.bola.com>: <https://www.bola.com>
- Dye, T. R. (1987). *Understanding Public Policy* . Amerika.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Harvard: Harvard University.
- Farneubun, L. (2000). *Program Pembinaan KONI Maluku Dalam Upaya Peningkatan Prestasi*

Atlet Cabang Olahraga Atletik. Ambon: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan FKIP Universitas Pattimura.

Islamy, I. (1999). *Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik*.

Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik* .

MacRae, J. A. (1979). *Policy Analisis for Public. Decesions* . London: Trinity College.

Mc Rae, J. A. (1967). *Analisis Policy For Public*. London: Trinity College.

Miftah. (1997). *Atletik Cabang Olahraga*. 16-17.

Purnomo, E. (1997). *Peran Ilmu Pengetahun dan Teknologi Dalam Olahraga*. Yogyakarta: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Yogyakarta.

Riyaningsih, M. (2019). *Pembinaan Prestasu Cabang Olahraga Atletik di Kabupaten Kudus*. Kabupaten Kudus: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

Widya, M. D. (2020). *Atletik Cabang Olahraga Perorangan*. *Kesehatan* , 56.

Yahya, Y. (2018, Mei 14). <http://armandotirta.blogspot.com/2018/05/pembinaan-dan-pengembangan-generasi-muda.html>. Retrieved Maret 26, 2022, from <http://armandotirta.blogspot.com>: <http://armandotirta.blogspot.com>

The Effect of Financial Literacy,
Life Style, Financial Attitude and
Locus of Control to Financial
Management Behavior

Amila Syaliha¹⁾

Entar Sutieman²⁾

Muhamad Ridwan Pasolo³⁾

Victor Pattiasina⁴⁾

1-4 Universitas Yapis Papua

victorpattiasina6@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No. 1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study was conducted to examine whether Financial Literacy, Lifestyle, Financial Attitude and Locus of Control have an effect on Financial Management Behavior in Accounting Students at Yapis University, Papua. The population in this study were all active and registered accounting students at Yapis University Papua. Samples were taken using purposive sampling method with a sample size of 50 respondents. The data used in this study were obtained using a questionnaire. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis.

Based on the results of the study, it shows that financial literacy and locus of control have a positive and significant effect on financial management behavior in accounting students at Yapis University, Papua. While lifestyle and financial attitudes have no positive and insignificant effect on financial management behavior in accounting students at Yapis University Papua.

Keywords : Financial Literacy, Lifestyle, Financial Attitude, Locus of Control, Financial Management Behavior

Introduction

Knowledge of financial management is required nowadays, because managing finance is a fact that one must get through in their life. Effective behavior of financial management is very important for someone to have in applying financial knowledge she or he had in daily life so that the risk of financial problem such as failure in financial management can be avoided. The phenomena of consumerism and consumptive behavior nowadays become higher in the society including the students of university. This fact is supported by Kasali's statement, a professor in Universitas Indonesia, who stated that a serious problem happening in our society is consumerism, which means the tendency of buying motivated more by the willingness than necessary, cited from <https://lampung.tribunnews.com>.

The phenomena of consumerism and consumptive behavior of the society, especially students, is triggered by the technology development which eases all access of necessary fulfillment; lack of saving activity, investment, emergency fund planning, future budgeting; and life style, also extravagant behavior of consumption (Veriwati et al., 2021). These things can directly affect the financial management behavior. It can be uncontrolled and unstable if the individual shopping habit is motivated more by willingness than necessity (Baptista dan Dewi, 2021).

Percentage of financial literacy 2019

No.	Country	Percentage
1.	Indonesia	38,03%
2.	Thailand	82%
3.	Malaysia	85%
4.	Singapura	98%

Source : <https://www.ojk.go.id>

Table presents the survey result by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), an authority of financial service, in 2019 about the level of financial literacy of the society in Indonesia. It shows that the percentage of financial literacy level in Indonesia is 38,03% which is lower than other counties like Thailand, 82%; Malaysia, 85%; and Singapore, 98%. In national survey of financial literacy and inclusion, Papua and West Papua Barat are under national index, they are 29,13% and 28,87% (see: <https://papua.antaraneews.com>). This fact shows that the society in Indonesia, especially in Papua and West Papua are lack of financial literacy and attitude about financial product and knowledge of effective application and

usage of financial service. Financial behavior that is still low is closely related to the knowledge possessed regarding financial products.

The important of financial literacy and the skill to manage personal finance, especially university students is a must since in this age they are required to be able to manage their own finance. They are also included in the group that have big contribution on Indonesia Economy because they are going to join the world of job in the future. According to Dewi et al (2021) students are a social group who are easily affected by the change of life style, trend and fashion, which can cause financial attitude problem. Therefore, they must pay more attention in making decision of their expenses.

The writer carried a preliminary observation through interview to ten students of accounting year of 2018 at Universitas Yapis Papua. It showed that the students were not able to apply their skill in financial management and tended to have consumptive behavior and follow extravagant and hedonism lifestyle. They earned limited money but expended bigger and tended to by things they did not really need wastefully. This showed that the students were lack of making proper budgeting in managing their money and less selective in making decision.

The writer took this title based on the novelty of variable and the happening phenomena related to the topic. The result of empirical studies tracking by the writer showed that there is research gap. Research gap is an inconsistency between one research and the others (Kurniawan et al. 2020). Regarding this, the writer was interested to do a follow-up research to analysed effect of financial literacy, lifestyle, financial attitude and locus of control on the financial management behavior.

Literature Review and Hypothesis Development

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) is a behavior theory stated that almost all human behaviors are based on their intention and their ability in making conscious choice and decision to act (Wicaksono and Nuryana, 2020). In this study, it was described that someone who has good skill on financial management started from financial literacy he has along with an intention or thought also self control that create the process of financial management planning and strong thought or desire to manage the money properly. This theory was used

as a framework in explaining how financial literacy, lifestyle, financial attitude and locus of control on the financial management behavior.

Theory of Behavioral Finance

According to Nofsinger in Assyfa (2020) *Theory of Behavioral Finance* explains how someone consciously behave in deciding his finance. Behavioral finance is an approach explaining how human use their money and invest. Behavioral finance involves attitude, emotion, affection and various things inhere on oneself as social and intellectual creatures who can interact with decision and act. An individual having responsible behavioral finance tends to be more efficient in using money such as being economical, making budget plan, shopping control and doing investment (Yunita, 2020).

Financial Management Behavior

Financial Management Behavior consist of explanation of rational and well-managed decision making pattern and behavior in financial management in which there are earning and saving for daily need and how to do planning, auditing and budgeting (Sampoerno dan Asandimitra, 2021). According to Rachmawati and Nuryana (2020), the indicator of financial management consists of: organizing, expenses and saving behavior.

Financial Literacy

Financial literacy, according to Remund (2010), is a measurement of comprehension level of someone related to financial concept, ability and belief to allocate his money through decision making and short and long time financial planning considering the economic condition and phenomena (Dewanti and Haryono, 2021). A study by Zahriyan (2016) and Gunawan et al., (2020) stated that financial literacy is divided into four indicators, namely: basic financial knowledge, saving and borrowing, insurance, and investment.

Accordingly, former studies by Ameliawati and Setiyani (2018), Sugiharti and Maula (2019) and Rachmawati and Nuryana (2020) stated that, financial literacy had positive and significant impact on financial management behavior. In line with the study by Baptista and Dewi (2021) and Napitupulu et al (2021), it was stated that financial literacy affected the financial management behavior. This is supported by the study carried by Amalia et al (2021) and Veriwati et al (2021) which stated that financial literacy had significant impact on the students financial management behavior.

H₁ : Financial Literacy affect the financial management behavior

Life Style

Life style can be defined as someone life pattern in the world expressed in activity, hobby, and opinion which distinct him with others in expending money and how he allocates the time properly that can be seen in routine activity (Dewi et al., 2021). Indicator used to measure lifestyle in this study is adapted from a study by Gunawan et al. (2020), namely: activity, hobby, perception on self and others and basic characteristics like the cycle of life he had been through, salary, education, and where he lives.

In line with the studies by Parmitasari et al (2018), Putri and Lestari (2019) and Gunawan et al (2020) which stated that life style had positive and significant impact on the financial management behavior. The finding of those research is also supported by the finding of the studies by Dewi et al (2021), Sampoerno and Asandimitra (2021) and Rozaini and Purwita (2021).

H₂ : Life style affects the financial management behavior

Financial Attitude

Financial attitude can be defined as the action of individual based on financial principal to make decision in managing the finance (Amalia et al., 2021). Financial attitude can help someone behaving toward the finance whether in financial management, budgeting, and how a decision will finally made. According to Furnham, in Herdjiono and Damanik (2016) and Gahagho et al., (2021) indicators of financial attitude consist of saving activity, budgeting and being economical.

Studies by Herdjiono and Damanik (2016), Ameliawati and Setiyani (2018) and Khairani and Alfarisi (2019) stated that financial attitude has significant impact on financial management behavior. The finding is also supported by Pradiningtyas and Lukiasuti (2019), Rachmawati and Nuryana (2020), Wicaksono and Nuryana (2020), Baptista and Dewi (2021) and Amalia et al.,(2021). Better financial attitude will produce better and optimal financial management. The understanding about financial attitude will ease someone to comprehend the meaning of money and how to behave properly to the money.

H₃ : Financial attitude affects the financial management behavior

Locus of Control

According to Dewanti and Haryono (2021) Locus of control is a belief of someone on the ability of self control through the view of event experienced with self control factor as the basic and priority scale of necessity selection in doing something since it will decide the success or failure. This study is related the attitude of financial management of internal locus of control. People who have internal locus of control always relate the events they experienced with their own internal factor. Because, they believe that the result of their attitude is caused of the internal factor in their inner self. The indicators used in this study were adapted from Afriani and Kartika (2021). They are: ability, interest and Effort.

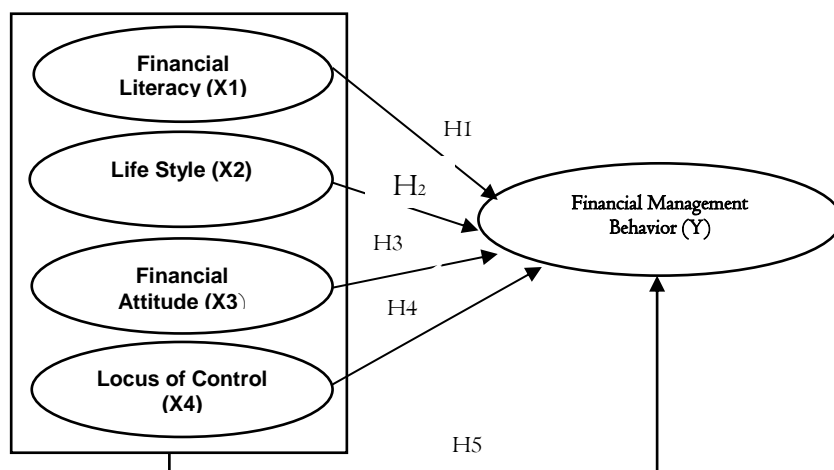
Research by Lukesi et al., (2021) and Afriani and Kartika (2021) also found the same that locus of control had positive and significant impact on financial management behavior. It means that if the control of individual is better his financial management behavior will be better too. On the contrary, if the individual self control is worse, his financial management behavior will be also worse.

H₄ : Locus of Control affects the financial management behavior

Empirical Model

The empirical model of this study described the relation of financial literacy, life style, financial attitude, and locus of control to the financial management & behavior. Therefore, the empirical model can be seen in figure as follow:

Research Model



Research Method

The population in this study were all accounting students who were active and registered in Universitas Yapis Papua consisted of 384 students. The sampling technique used in this study was purposive sampling by concerning certain criteria required (Sutisman, 2015). Here are the criteria used:

1. The student of 2018 class, accounting study program, Economy and Business Faculty, Universitas Yapis Papua.
2. The students who passed introduction of accounting, introduction of management, and financial management subject.
3. The students who were active studying at that time.

Based on the criteria, 50 respondents (students) were chosen as the sample. The basic considerations taken are only 50 students of the 2018 batch who have contracted for accounting seminar courses and research methodologies.

The data collection method used in this study was questioner; a technique of collecting data through a form of written questions and (or) statement given to respondents to answer (Sabet et al., 2020). The instrument used to measure the variable was with likert scale 1–5 (1 : strongly disagree, 2 : disagree, 3 : less agree, 4 : agree, 5 : strongly agree). The testing in this study was carried by adapting SPSS 22. The testing involved several test, namely: instrument testing; classic assumption testing; multiple linear regression testing; and determinant coefficient testing.

Result and Discussion

Research Instrument Testing

Basically, doing a research is doing a measurement which result can be used as communication tool between the respondents and the researcher. The research instrument is a device used to measure the natural or social phenomena being observed. Therefore, there must be a good measurement tool as the instrument holds important role in research. A good instrument must fulfill the requirements, they are:

Validity Testing

Validity testing is used to measure whether the questionnaire is valid to applied. The testing was carried by using the formula of *Pearson correlation* with the value of r calculated

was gain from SPSS output, this score then would be compared to the value of r table. In this study, the data used were from 50 respondents, so the degree of freedom was 48 ($df = 50 - 2 = 48$) with 0,05 level of significance of two way testing. Therefore, the r table was 0,2787. The complete testing result can be seen as follow.

Validity Testing

Variable	Indicator	r cal	r table	Note
Financial Management Behavior (Y)	Y1	0,870	0,2787	Valid
	Y2	0,731	0,2787	Valid
	Y3	0,820	0,2787	Valid
Financial Literacy (X1)	X1.1	0,453	0,2787	Valid
	X1.2	0,805	0,2787	Valid
	X1.3	0,866	0,2787	Valid
	X1.4	0,912	0,2787	Valid
Life Style (X2)	X2.1	0,766	0,2787	Valid
	X2.2	0,718	0,2787	Valid
	X2.3	0,669	0,2787	Valid
	X2.4	0,815	0,2787	Valid
Financial Attitude (X3)	X3.1	0,885	0,2787	Valid
	X3.2	0,769	0,2787	Valid
	X3.3	0,810	0,2787	Valid
Locus of Control (X4)	X4.1	0,894	0,2787	Valid
	X4.2	0,697	0,2787	Valid
	X4.3	0,809	0,2787	Valid

Based on the table above, it showed that the value of r calculated of every questionnaire item was bigger compared to r table. It means that all the questionnaire items were valid.

Reliability Testing

Reliability testing was used to measure a questionnaire which would be the indicator of variable or construct (Noch dan Rasyid, 2012). It was measured by statistical test of *Cronbach Alpha* (Pattiasina et al., 2021), a variable is stated reliable if the score of *Cronbach Alpha* bigger than the critical score 0,7. The result of the test on every variable in this study was presented in the following table.

Reliability Testing

Variable	Cronbach's Alpha	Critical Score	Note
Financial Management Behavior (Y)	0,733	0,7	Reliabel
Financial Literacy (X1)	0,745	0,7	Reliabel

Variable	Cronbach's Alpha	Critical Score	Note
Life Style (X2)	0,729	0,7	Reliabel
Financial Attitude (X3)	0,749	0,7	Reliabel
Locus of Control (X4)	0,719	0,7	Reliabel

Based on the table above, it showed that the score of *Cronbach's Alpha* $> 0,7$ at all variables. It means all measurement concepts of each variables in the questionnaire were reliable thus all the data in this study were qualified and consistence.

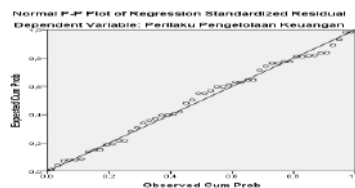
Classic Assumption Testing

Classic assumption testing is a requirement of hypothesis testing aimed to test the linear regression equation so that it can be said as proper model. This testing covered:

Normality Testing

Normality testing is used to know whether the normal distribution of variable resides in regression model. A good regression model is distributed normally or closed to normal. Normal distributed data can be seen from the data spread on diagonal line in *normal probability plot* graphic, where the data follow the diagonal line.

Normality Testing



Based on the figure above, it is known that on the diagonal line, the financial management behavior (Y), the dots explained that the regression data follow the line. It means that regression model in this study was distributed normally and can be used for the next testing.

Multikolinearity Testing

Multicollinearity testing is used to know the existence of multicollinearity in regression model used in this study. To detect multicollinearity, *Tolerance Value* or *Variance Inflation Factor* (VIF) is used. If the value of VIF is under 10 and *Tolerance Value* is above 0,10, there is no multicollinearity (Sumartono, 2017). The result of multicollinearity testing can be seen as follow.

Multicollinearity Testing

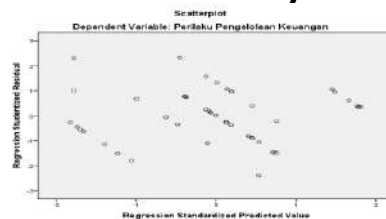
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Financial Literacy	0,665	1,503
Life Style	0,730	1,370
Financial Attitude	0,318	3,142
Locus of Control	0,313	3,195

Based on the table above, it shows that the value of *tolerance* on independent variable $> 0,1$ and the value of *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Therefore, it can be concluded that there is no multicollinearity in all regression model and the following testing could be applied.

Heteroscedasticity Testing

Heteroscedasticity testing aims to test whether or not dissimilarity of variance from an observation to another occurs in regression model. The following figure shows the *scatterplot* in heteroscedasticity testing:

Heteroscedasticity Testing



Based on the figure above, it shows that on Y axis (financial management behavior) the dots scatter around, over and below Y axis or 0. It means that this testing requirement success with the indication that there was no heteroscedasticity, thus the next testing could be carried.

Data Analysis

Linear Regression Analysis

Variable	Unstandardized Coefficients (B)	t calc	Sig	Note
Constant	1,437			
Financial Literacy	0,406	6,910	0,000	Significant
Life Style	0,095	1,528	0,133	Not Significant
Financial Attitude	0,017	0,155	0,878	Not Significant
Locus of Control	0,453	3,682	0,001	Significant
T table	2,01410			

Variable	Unstandardized Coefficients (B)	t calc	Sig	Note
F calc	45,143			
F table	2,58			
Significant F	0,000			
Adjusted R Square	0,783			

Regression model from the table can be written as follow:

$$Y = -1,437 + 0,406X_1 + 0,095X_2 - 0,017X_3 + 0,453X_4 + e$$

The equation can be explained below:

- 1) Constant value is -1,437, it shows that if the value of independent variable in this study was 0 or constant, the dependent variable, financial management behavior (Y) was -1,437.
- 2) The value of regression coefficient of financial literacy variable (X_1) was 0,406 and positive. It means that if every improvement of the variable was 1, the value of financial management behavior improve 0,406. Therefore, financial Literacy gave positive contribution to the financial management behavior.
- 3) The value of regression coefficient of life style variable (X_2) was 0,095 and positive. It means that if every improvement of this variable was 1, then the value of financial management behavior variable will improve 0,095. Hence, life style gave positive contribution to the financial management behavior.
- 4) The value of regression coefficient of financial attitude variable (X_3) was -0,017 and negative. It means that if every improvement of financial attitude variable was 1, then the value of financial management behavior variable will decrease 0,017. Therefore, financial attitude give negative contribution to the financial management behavior.
- 5) The value of regression coefficient of Locus Of Control variable (X_4) was 0,453 and positive. It means that if every improvement of this variable was 1, the value of financial management behavior variable will improve 0,453. Therefore, Locus Of Control gave positive contribution to the financial management behavior.

Partial t Significant Testing

T test or partial test was used to test separately whether independent variable affected the dependent variable. Based on the partial t test the analysis of hypothesis could be drawn. However, the value of T_{table} must be found. Since the amount of respondents was 50 (n), the variables were 5 (k) and the significant value was 0,05, T_{table} value is 2,01410.

Hypothesis 1 Testing

Based on table 4.11, the result of t test showed that financial literacy variable (X1) had T_{calc} 6,910 > T_{table} 2,01410. The significance value gained was 0,000 < significance level 0,05. Therefore, it can be concluded that financial literacy variable (X1) affects the financial management behavior variable (Y) positively and significantly. So that, the hypothesis (H₁) stated that financial literacy affect the financial management behavior is accepted.

Hypothesis 2 Testing

Based on table 4.11, the result of t test showed that life style variable (X2) had the value of T_{calc} 1,528 < T_{table} 2,01410. The significance value gained was 0,133 < level of significance 0,05. It can be concluded that life style variable (X2) do not affect significantly on the financial management behavior variable (Y). Therefore, the hypothesis (H₂) stated that lifestyle affect financial management behavior is rejected.

Hypothesis 3 Testing

Based on table 4.11 the result of t test showed that financial attitude variable (X3) had the value of T_{calc} -0,155 < the value of T_{table} 2,01410. The significance value gained was 0,878 > level of significance 0,05. it can be concluded that this variable (X3) had no significant impact on the financial management behavior variable (Y). So, the hypothesis (H₃) is rejected.

Hypothesis 4 Testing

Based on table 4.11 the result of t test showed that locus of control variable (X4) had the value of T_{calc} 3,682 > the value of T_{table} 2,01410. The significance value gained was 0,001 < level of significance 0,05. It can be concluded that Locus of Control variable (X4) had positive and significant impact on the financial management behavior variable (Y). Therefore, the hypothesis (H₄) is accepted.

Simultaneous F Testing

F test is to test the relation of regression simultaneously which aims to know whether all independent variables altogether had significant effect on dependent variable. Based on table 4.11, the result of simultaneous F test showed that the value of F_{calc} was 45,143 and significance value was 0,000. The amount of sample forming the regression was 50 and the variables were 5. The formula to get the value of F_{table} was $N1 = k-1 = 5-1 = 4$, while $N2 = n-k-1 = 50-4-1 = 45$, on significance 0,05, so the value of F_{table} was 2.58. It means that the value of $F_{\text{calc}} >$ the value of F_{table} and the significance value was $0,000 < 0,05$. It can be concluded that financial literacy (X1), life style (X2), financial attitude (X3) and Locus Of Control (X4) affect the financial management behavior variable (Y). Therefore, the hypothesis (H_5) is accepted.

Determinant Coefficient Testing (R^2)

Determinant test is used to measure how big is the contribution percentage of the effect of independent variable to the dependent variable. Based on table 4.11, the test showed that the value of determinant (R^2) or adjusted r square was 0,783. It means that the variable of financial literacy (X1), life style (X2), financial attitude (X3) and Locus Of Control (X4) could contribute or affect the financial management behavior variable as big as 78,3%. The rest 21,7% is the contribution of other independent variables out of this research.

Discussion

Financial Literay Effects to The Financial Management Behavior

Based on the result of multiple linear regression, it is known that financial literacy variable (X1) had positive and significant impact on the financial management behavior variable (Y). Therefore, financial literacy is the main factor affecting financial management behavior. The level of financial literacy will be able affecting the level of financial management behavior.

This result is inline with the study by Sugiharti and Maula (2019) stated that there is significant relation between financial literacy with the financial management behavior. It stated that the higher the literacy and ability in implementing finance aspects will create wise financial management behavior and efficient financial management.

The result showed that the better the financial literacy, the better financial management. Financial literacy can be a strong base to help people in facing every risk which probably happens in the process of financial management and decision making related to their activity.

This is in line with the study by Amalia et al (2021), Dewi et al (2021), Baptista and Dewi, (2021) stated that financial literacy variable affected the financial management behavior significantly.

Life Style has no Effect on the Financial Management Behavior

Based on the result of multiple linear regression, it is known that life style variable (X2) has no significant effect on financial management behavior variable (Y). Thus, life style is not a main factor affecting financial management behavior. That level of life style will not affect the level of financial management behavior.

Life style can be defined as a life pattern expressed in activity, hobby or interest, and opinion. It describes whole image of a person in interacting with the environment. The reason why life style does not affect on students financial management behavior is because they do not really care about life style and have broad enough financial literacy.

This finding is also supported by Barus (2018), Qur'ani (2019) and Christantri (2020) who stated that life style does not affect financial management behavior significantly.

Financial Attitude does not Effect Financial Management Behavior

Based on the result of multiple linear regression, it is known that financial attitude variable (X3) does not affect the variable of financial management behavior (Y) significantly. Therefore, financial attitude is not a main factor affecting financial management behavior. The level of financial attitude will not be able affecting the level of financial management behavior.

It is because the students spend their earning for their own importance. Even if a man has a large amount of earning will not fulfill the his/her unlimited will as a nature of human being. The youngsters tend to find self pleasures. They save their money at the bank and if it is enough they spend it to get what they want. The money spent in form of product or service is also kept for urgent or sudden need which is out of budgeting (Nusa and Martfiyanto, 2021).

This is similar to the study by Zahriyan (2016), Rizkiawati and Asandimitra (2018) and Gahagho et al (2021) stated that financial attitude has no significant effect on financial management behavior.

Locus of Control Effects to Financial Management Behavior

Based on the result of multiple linear regression, it is known that the variable of Locus Of Control (X4) has positive and significant effect on the variable of financial management behavior (Y). Consequently, Locus Of Control become a main factor affecting financial management behavior. The level of Locus Of Control will affect the level of financial management behavior.

Locus of control which becomes the trigger of internal and external changes will generate better change of financial management behavior. Hence, if locus of control is better, financial management behavior will be also better. This study showed that internal locus of control always relates the event experienced with the internal factor in one self. It is because they believe that the result of their action is caused by internal factor.

This is supported by the study of Rizkiawati and Asandimitra, (2018), Lukesi et al (2021) and Afriani dan Kartika (2021) which stated that locus of control had significant affect on financial management behavior.

Financial Literacy, Life style, Financial Attitude and Locus of Control altogether Effects to the Financial Management Behavior

Based on the result of multiple linear regression, it is known that financial literacy, life style, financial attitude and locus of control simultaneously and significantly affects financial management behavior. They are able to contribute up to 78,3% effect to the financial management behavior. It can be concluded that they are important factors in affecting the level of financial management behavior mainly on life style factor which has significant effect.

Conclusion

This study aimed to test the effect of financial literacy, life style, financial attitude, and Locus of Control on the financial management behavior. Based on the analysis and discussion described previously, some conclusions can be drawn at the following:

1. Financial literacy has positive and significant impact on financial management behavior of accounting students of Universitas Yapis Papua.
2. Life style does not significantly affect financial management behavior of accounting students of Universitas Yapis Papua.
3. Financial attitude does not significantly affect financial management behavior of accounting students of Universitas Yapis Papua.
4. Locus Of Control has positive and significant impact on financial management behavior of accounting students of Universitas Yapis Papua.
5. Financial literacy, life style, financial attitude and Locus Of Control simultaneously affect financial management behavior.

Recomendation

There are some recomendations that can be given at the following:

1. To the students of Universitas Yapis Papua or other college should always improve the motivation and the level of awareness in financial management properly, also control financial management behavior mainly on life style aspect.
2. To the Universitas Yapis Papua, it is expected that this study can be an additional reference to anyone who wants to do related study, the effect of financial literacy, life style, financial attitude, and locus of control on the financial management behavior.
3. For further researcher, it is sugested to add other independent variables which can affect financial management behavior, and different research object selection other that in college or university in order to get better result.

Reference

- Afriani, Raden Irna, and Rika Kartika. 2021. "Pengaruh Financial Knowledge Dan Locus Control Terhadap Financial Management Behavior Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Akuntansi Universitas Bina Bangsa." *Jurnal Manajemen dan Bisnis XIII*(June): 163–79.
- Amalia, Ratri Diska, Supri Wahyudi Utomo, and Nur Wahyuning Sulistyowati. 2021. "Determinan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi UNIPMA." *Tangible Journal* 6(1): 77–93.
- Ameliawati, M, and R Setiyani. 2018. "The Influence of Financial Attitude, Financial Socialization, and Financial Experience to Financial Management Behavior with

- Financial Literacy as the Mediation Variable." *KnE Social Sciences* 3(10): 811.
- Assyfa, Ladira Nur. 2020. "Pengaruh Uang Saku, Gender Dan Kemampuan Akademik Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Akuntansi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Intervening." *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi (PRISMA)* 01(01): 109–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>.
- Baptista, Stella Maris Juhar, and Andrieta Shintia Dewi. 2021. "The Influence of Financial Attitude, Financial Literacy, and Locus of Control on Financial Management Behavior (Study Case Working-Age of Semarang)." *International Journal of Social Science and Business* 5(1): 93–98.
- Barus, Nadia Nathania Bru. 2018. "Pengaruh Gaya Hidup, Etnis Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan." *Skripsi*.
- Christantri, Audina Martha. 2020. "Pengaruh Pengalaman Keuangan, Pola Gaya Hidup, Dan Toleransi Risiko Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Guru Sma Sederajat."
- Dewanti, Pradita Vicky, and Nadia Asandimitra Haryono. 2021. "Pengaruh Financial Socialization, Financial Knowlegde, Financial Experience Terhadap Financial Management Behavior Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna Paylater." *Jurnal Ilmu Manajemen* 3 9(3).
- Dewi, Ni Luh Putu Kristina, Agus Wahyudi Salasa Gama, and Ni Putu Yeni Astiti. 2021. "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme, Dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Unmas." *Jurnal EMAS* 2: 74–86.
- Gahagho, Youla Diknasita, Tri Oldy Rotinsulu, and Dennij Mandej. 2021. "The Influence of Financial Literation on Financial Attitudes and Revenue Resources on Financial Management Behavior of Students of the Faculty of Economics and Business UNSRAT With Intention as Intervening Variables." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9(1): 543–55.
- Gunawan, Ade, Wimpi Siski Pirari, and Maya Sari. 2020. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ade." *Jurnal Humaniora* 4(2): 23–35.
- Herdjiono, Irine, Lady Angela Damanik, and Universitas Musamus. 2016. "Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior." *Manajemen Teori dan Terapan* 1(3): 226–41.

- Khairani, Fadilla, and Mohamad Fany Alfarisi. 2019. "Analisis Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Pendidikan Orang Tua Dan Parental Income Terhadap Financial Management Behavior Pada Mahasiswa S1 Universitas Andalas" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4(1): 360–71.
<https://scholar.google.com/citations?user=e-MLpBIAAAAJ&hl=en>.
- Kurniawan, Wahyu, Entar Sutisman, Yana Ermawati, M Ridhwansyah Pasolo dan Sumartono 2020. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Pengguna Anggaran Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua)." *The Journal Of Business and Management Research*. <http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/tjbmr/article/view/18>.
- Lukesi, Ervina, Erna Reta Rahadjeng, and Novita Ratna Satiti. 2021. "Effect of Financial Attitudes, Financial Knowledge, Locus of Control, and Financial Self-Efficacy to Financial Management Behavior in Millennial Generation." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 01(01): 56–63.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jamanika/article/view/16027>.
- Napitupulu, Jeremia Hasiholan, Noor Ellyawati, and Ratna Fitri Astuti. 2021. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Kota Samarinda." 9(3).
- Noch, Muhammad Yamin, and Abdul Rasyid. 2012. *Metode Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*.
- Nusa, Gerlan Haha, and Roy Martfiyanto. 2021. "The Effect Of Financial, Knowledge, Behavior and Attitude To Financial Literacy On Accounting Bachelor Students Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(2): 226–37.
- Parmitasari, Rika Dwi Ayu, Zulfahmi Alwi, and Sunarti S. 2018. "Pengaruh Kecerdasan Spritual Dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Makassar." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 5(2): 147.
- Pattiasina, Victor, Muhamad Yamin Noch, Melyanus Bonsapia, and Andarias Patiran. 2021. "Determinan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dimoderasi Oleh Pendidikan Dan Pelatihan." *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2(1): 37–56.

- Pradiningtyas, Tifani Enno, and Fitri Lukiastuti. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Locus of Control Dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 6(1): 96.
- Putri, Nurul Amalia, and Diyan Lestari. 2019. "Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda Di Jakarta." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 1(1): 31–42.
- Qur'ani, Nurul Mujahidah. 2019. "Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Keuangan Dan Kepuasan Keuangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Makassar." 11(1): 1–14.
- Rachmawati, Novi, and Ita Nuryana. 2020. "Peran Literasi Keuangan Dalam Memediasi Pengaruh Sikap Keuangan, Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan." *Economic Education Analysis Journal* 9(1): 166–81.
- Rizkiawati, Nur Laili, and Nadia Asandimitra. 2018. "Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control Dan Financial Self-Efficacy Terhadap Financial Management Behavior Masyarakat Surabaya." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 6(3): 2. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23846/21793>.
- Rozaini, Noni, and Suci Purwita. 2021. "Gaya Hidup Dan Hasil Belajar Manajemen Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa." *Niagawan* 10(2): 198.
- Sabet, Eli, Victor Pattiasina, Yaya Sondjaya, and Kartim. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura)." *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua* 1(2): 38–47.
- Sampoerno, Alfrin Erman, and Nadia Asandimitra. 2021. "33. Pengaruh Financial Literacy , Income , Hedonism Lifestyle , Self-Control , Dan Risk Tolerance Terhadap Financial Management Behavior Pada Generasi Milenial." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 9(3).
- Sugiharti, Harpa, and Kholida Atiyatul Maula. 2019. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa." *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 4(2): 804–18.
- Sumartono. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura)." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 26–43. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

- Sutisman, Entar. 2015. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Return Saham Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2012-2014." *Jurnal Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* (11): 23–40.
- Veriwati, Silviana, Dessy Triana Relita, and Emilia Dewiati Pelipa. 2021. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 6(1): 43–53.
- Wicaksono, Ardian Bagus, and Ita Nuryana. 2020. "Pengaruh Sikap Keuangan, Teman Sebaya, Dan Kecerdasan Spiritual Melalui Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan." *Economic Education Analysis Journal* 9(3): 940–58. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>.
- Yunita, Nia. 2020. "Pengaruh Gender Dan Kemampuan Akademis Terhadap Literasi Keuangan Dalam Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi." *PRISMA (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01(02): 1–12.
- Zahriyan, Moch. Zakki. 2016. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Terhadap Uang Pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga." *Journal of Business and Banking* 1: 1–10.
- Zainiati, Nia. 2017. "Pengaruh Locus of Control Dan Sikap Keuangan Yang Dimediasi Oleh Niat Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga." *Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.

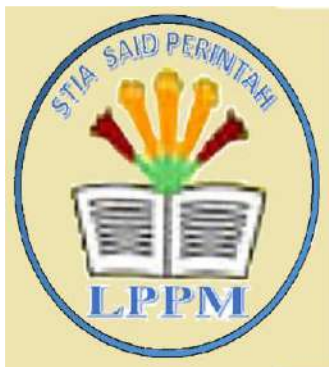
Johan Tanamal¹⁾

Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah

Lodewyk Nahuway²⁾

Prodi Sosiologi STISIP Kebangsaan

johantanamal149@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No.1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study was aimed at learning the view of Nuaulu tribe toward the early marriage of women also to know how women of Nuaulu which is still and education can avoid the early marriage. The result showed that 2 major culture factors influenced the early marriage, are Nuaulu people tend to consider the women in the lowest position in the their tribe also people of nuaulu are not well educated. The influenced their way of the thinking and prompted the early marriage within their tribe.

Meanwhile, being kept marginalize by the situation such as when the girl is labled as dowry, it is consider that the girl can produce the money to help her parents by being married. Moreover, after the girl have their first period, they will Pinamoukan. Therefore the solution to this early marriage is the women of Nuaulu must get an education to a high level.

Keywords : Early Marriage,
Marginalization of Nuaulu
Woman

Pendahuluan

Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan selalu saja menjadi topik hangat untuk dikaji oleh setiap orang, apalagi penelahaan tentang dunia wanita yang dihubungkan dengan kesetaraan gender yang bukan saja dihadapi oleh masyarakat yang sudah maju, namun juga mengena pada masyarakat kita yang ada dipedesaan, seperti orang Nuaulu di Negeri Nuanea. Negeri Nuanea secara geografis terletak pada bagian selatan dari pulau seram dan berada pada wilayah kecamatan Amahai dan terletak pada kilometer 12 dari kota Masohi kabupaten Maluku Tengah.

Komunitas masyarakat Nuaulu di Nuanea dalam pengamatan penulis adalah merupakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang oleh pemerintah lewat Perpres Nomor 186 Tahun 2014 diartikan sebagai kumpulan orang pada jumlah tertentu yang terikat secara geografis, ekonomis, sosial budaya dan miskin serta terpencil. Namun demikian mereka telah mengalami perubahan (walaupun prosesnya sangat lambat) dimana mereka sudah mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat lain diluar komunitasnya yang kemudian membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan dan bukan saja dirasakan oleh kaum pria tetapi juga kaum perempuan.

Bukti nyata terbukanya ruang interaksi komunitas Nuaulu dengan pihak luar terlihat mereka (baik laki-laki maupun perempuan) mampu mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bahkan dewasa ini mereka telah menempuh pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi terutama pada Perguruan Tinggi yang berada di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Perempuan dalam anggapan tertentu hanyalah sebagai pendamping suami apabila kelak berkeluarga, yang bertugas digaris belakang untuk merawat anak, masak dan melayani suami. Anggapan tersebut terpatahkan dengan adanya upaya kaum perempuan terutama perempuan nuaulu di Nuanea untuk tidak saja berada digaris belakang tetapi telah diberi ruang untuk mengangkat harkat dan martabatnya melalui upaya mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, hal terlihat melalui hasil wawancara penulis dengan informan yang telah melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang strata satu yang ada di kota Masohi dan informasi dari kantor negeri administrasi Nuanea tentang jumlah anak perempuan Nuaulu Nuanea yang sedang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di kota Masohi pada tahun 2021 sebanyak 7 mahasiswa. Terkait dengan kesetaraan gender

maka upaya menempuh pendidikan bagi kaum perempuan Nuaulu adalah salah satu bentuk upaya pemecahan kesetaraan gender sementara faktor pendidikan dianggap sebagai perisai untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari kaum wanita dan melihat jauh kedepan akan sesuatu hal yang ingin dicapai.

Terkait dengan itu institusi pendidikan seperti sekolah dan Perguruan Tinggi mempunyai manfaat penting karena telah mengambil alih peran-peran yang semula dijalankan oleh lembaga agama. Keluarga dan lembaga sosial lainnya. Dimana sejak 1950-an peran Perguruan Tinggi sebagai kendaraan mobilitas sosial semakin meningkat dan tidak terbantahkan, sejak saat itu Perguruan Tinggi menjadi sarana mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat dan secara khusus membuka pintu kelas sosial menengah bagi masyarakat lapisan bawah (Arifin, 2017).

Lebih jauh Davis Kingsley dan Judith Blake, (1956) bahwa ketika berlanjutnya pendidikan mengandung pengertian akan adanya suatu proses abstinensi yang terjadi secara tidak langsung dari seorang perempuan, termasuk yang dialami oleh kaum perempuan Nuaulu, dimana dengan upaya melanjutkan pendidikan berarti adanya upaya mereka untuk menghindari pernikahan dini.

Orang Nuaulu umumnya mendiami daerah Seram bagian selatan. Keberadaan orang Nuaulu di daerah tersebut memungkinkan mereka telah berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan tidak sama ketika mereka masih di hutan, hal ini terlihat dimana telah berlangsungnya proses pernikahan dengan masyarakat diluar komunitasnya, mereka telah melakukan transaksi jual beli di pasar Binaya kota Masohi dan telah mengenyam pendidikan sampai pada pendidikan tinggi, bahkan sudah ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tetapi keterbukaan serta kemajuan yang telah dicapai tadi ternyata masih meninggalkan banyak problem yang terkait dengan kesetaraan gender dimana masih banyak mereka terutama kaum perempuan yang harus menikah diusia dini (setelah lulus Sekolah Dasar) hal ini terjadi karena pada awalnya mereka telah dijodohkan, sehingga ketika mereka telah di Pinamoukan maka mereka sudah layak untuk dinikahkan. Keadaan ini menunjukkan adanya marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu di negeri Administratif Nuanea dengan fokus penelitiannya adalah; 1) Bagaimana pandangan orang Nuaulu tentang perkawinan dini perempuan Nuaulu dan, 2) Bagaimana perempuan Nuaulu yang sementara menempuh pendidikan mampu terhindar dari perkawinan dini.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan usia Dini adalah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita remaja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkhusus pada pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan dibolehkan jika si pria telah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah mengenai perilaku reproduksi manusia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menekankan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, hal ini dilatarbelakangi oleh terlalu banyak resiko kehamilan yang dihadapi pada usia dini, sehingga pernikahan boleh diijinkan jika laki-laki telah berumur 21 tahun dan perempuan telah berumur 19 tahun (Febrianti, 2021).

Lebih jauh dijelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif pada anak remaja. Dampak negatif dimaksud dapat dilihat pada beberapa segi antara lain;

1. Pada segi Psikologis

Dimana pada segi psikologis anak belum tahu atau tidak siap untuk tahu tentang hubungan seks, sehingga akan menyebabkan trauma psikologis yang sangat sulit untuk disembuhkan, dimana anak akan menunjukkan perilaku miring dan menyesali hidupnya. Selain itu ikatan pernikahan ini akan berdampak pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain dan hak menikmati waktu luang serta hak lain yang menempel pada diri anak.

2. Pada segi sosial

Fenomena ini berhubungan dengan unsur sosial budaya ditengah masyarakat yang meletakkan perempuan pada tempat yang rendah dan hanya dilihat sebagai pelengkap seks bagi pria.

3. Pada segi kebidanan

Pada segi kebidanan dijelaskan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun beresiko terkena penyakit kanker rahim. Kondisi ini terjadi akibat dari pada usia muda sel-sel rahim wanita belum matang.

4. Pada segi Hukum

Pada segi ini terjadi pelanggaran terhadap 3 (tiga) Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia yakni;

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang PTPPO.

Konsep Perempuan

Kondisi tentang kaum perempuan dalam segala bentuk penindasan yang dialami dalam beberapa dekade sebagaimana yang dituliskan dalam berbagai media cetak adalah sesuatu yang mungkin baru kita dengar, tetapi jauh sebelumnya prolema tentang kaum hawa ini telah lama menjadi konsumsi publik atau masyarakat. Pada dekade tahun 60-an tujuan politik feminis menitikberatkan pada kesamaan derajat antara kaum adam dan kaum hawa yang selama ini disingkirkan dan bahkan hampir dihilangkan oleh disiplin patriarkis, dimana kaum perempuan dijadikan sebagai objek penelitian. Seorang sosiolog terkenal bernama Auguste Comte berusaha memberikan pendapatnya tentang kaum perempuan bahwa perempuan secara konstitusional bersifat inferior terhadap laki-laki dan beliau berkeyakinan bahwa perempuan akan menjadi sub ordinat laki-laki ketika telah terjadi pernikahan dan bagi kaum perempuan tidak dibenarkan untuk melakukan perceraian, alasannya karena kaum perempuan adalah budak untuk kaum laki-laki. Selanjutnya demi terciptanya tatanan yang baik serta maju bagi Prancis, sangat dibutuhkan adanya otoritas patriarkat dan kediktatoran politik. Sebagai seorang ilmuwan, tentunya pemikiran ilmiah ini menjadi kebijakan untuk pemerintah dan masyarakat, apabila kebijakan dimaksud berkembang berlandaskan pemikiran kritis seorang ilmuwan (Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 2002).

Timbul pertanyaan kenapa keadaan demikian harus terjadi dan sangat memprihatinkan bagi perempuan, meskipun tokoh terkenal seperti Herbert Spencer, (1981) sudah mengemukakan idenya dalam memperjuangkan hak *Laisses Faire* untuk kaum wanita dengan pemikiran bahwa sifat-sifat alamiah kaum perempuan tidaklah tetap dan abadi. Walaupun ia sendiri menyatakan bahwa kaum wanita mempunyai hak untuk bersaing dengan laki-laki dan jika mereka memahami keadaan ini bahwa tempat mereka adalah domestik maka mereka tidak akan bertanya apapun.

Lebih jauh Aas Nurashah Barokah dan Yessy Hermawati, (2019) mengemukakan bahwa sistem budaya patriarki sudah menjadi alamiah dari asalnya dimana kaum perempuan

dianggap sebagai kaum paling lemah dan rendah. Kondisi ini menurutnya merupakan suatu kekeliruan terhadap kaum perempuan.

Nina Johan, (2012) berpendapat seirama dengan Spencer bahwa apabila kita membicarakan mengenai hak kaum perempuan dalam pengembangan dirinya sepanjang peradaban manusia, ketimpangan kekuasaan, perbedaan gender serta budaya patriarki adalah merupakan konsep diskriminasi serta praktek kekuasaan yang menyebabkan hak-hak perempuan yang tidak fundamental terlepas dan tercabut dari akarnya.

Anis Maswoni, (2016) menyatakan adanya suatu pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan bahwa perempuan dalam praktek kehidupan rumah tangga tidaklah lebih sebagai peran pembantu bagi kaum laki-laki dalam segala aspek, terutama pada aspek pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tradisional sangat sulit untuk berubah, dimana terdapat ketidaksetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah terhadap laki-laki. Budaya patriarki yang dominan kemudian merembes pada semua sistem sosial kemasyarakatan yang memberikan kesistemewaan hak kepada laki-laki dengan melemahkan posisi perempuan.

Dengan begitu kerasnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh Irvan Abdulah mengungkapkan bahwa munculnya marginalisasi terhadap perempuan telah menempatkan kaum hawa sebagai *the second sex* atau golongan kelas dua yang sama sekali kurang diperhitungkan dimana terdapat pemisahan atau dikotomi antara alami (*nature*) dan berbudaya (*culture*) yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara stratifikasi dari laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai sifat alami (*nature*) harus ditundukan agar mereka lebih berbudaya (*culture*).

Adanya upaya membudayakan kaum perempuan menyebabkan adanya ketimpangan pada keberadaan laki-laki dan perempuan, dimana perempuan mengisi sektor domestik seperti mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki diberikan hak untuk mengisi sektor publik. Kondisi demikian telah disahkan oleh pranata dan lembaga sosial yang telah menjadi fakta sosial mengenai status dan peran yang dilakoni oleh kaum perempuan. Sedangkan oleh More L. Hendrietta, (1998) bahwa mengapa perempuan lebih dekat dengan nature karena mereka lebih diidentikan dengan lingkup masyarakat luas dalam kehidupan sosialnya. Pandangan ini merupakan topik dalam Antropologi perempuan

yang menghubungkan dikotomi alam atau budaya dan pembagian yang sejalan dengan domestik dan publik yang adalah tipe universal tentang subordinasi perempuan. Tipe domestik versus publik adalah model yang tetap mempengaruhi berbagai penelitian pada bidang ilmu sosial, karena berusaha untuk menghubungkan penelitian budaya yang diberikan untuk kategori perempuan atau pengaturan kegiatan masyarakat.

Konsep Gender

Menurut Sastrawati, (2018) konsep gender pada mulanya dikemukakan oleh ilmuwan sosial untuk menampilkan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat alami atau bawaan sebagai anugerah Tuhan, dan yang bersifat dari suatu kebudayaan yang perlu diketahui dan diajarkan kepada setiap orang sejak masih kecil. Dengan mengetahui tentang perbedaan gender ini akan sangat membantu kita untuk pembagian peran yang sejak lama menempel pada kaum perempuan dan laki-laki guna membangun hubungan gender yang bersifat dinamis dan tepat, terlepas dari ketidakadilan gender serta berupaya menghadirkan rasa nyaman bagi kedua identitas yang berbeda.

Narwoko dan Suyanto, (2014) mengungkapkan bahwa marginalisasi perempuan adalah merupakan suatu ketidakadilan gender dalam bentuk pemiskinan terhadap suatu jenis kelamin tertentu yakni kaum perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender dimaksud. Lebih jauh dikatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta proses marginalisasi dan pemiskinan kaum hawa dapat berasal dari kebijakan pemerintah, kepercayaan tafsir agama, tradisi kebiasaan bahkan asumsi dari ilmu pengetahuan, contohnya nasib miris yang dialami oleh kaum perempuan Nuaulu sebagai suatu tradisi kebudayaan dimana mereka harus menikah diusia dini padahal jika dilihat kedepan kedepan semua perempuan sedang berlomba untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi lewat upaya menimba ilmu dan pengetahuan sampai ke dunia pendidikan tinggi. Lebih jauh Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, (2019) mengungkapkan bahwa marginalisasi adalah proses peminggiran sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada pemiskinan, lanjutnya masih terdapat banyak cara untuk memarginalkan seseorang antara lain bisa dengan memakai asumsi gender.

Ghufran, Kordi, Lusia, Muhammad, & Ramli, (2020) menyatakan bahwa perempuan kadang dirugikan ditengah masyarakat karena alasan tertentu, seperti hukum adat yang dianut oleh suatu masyarakat. Lanjutnya adat dan perempuan merupakan dua entitas yang

berbeda, dimana perempuan selalu dilihat pada posisi yang salah jika dilihat secara adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun, bahkan karena alasan adat mereka lalu diberi ruang yang terbatas, terutama hanya sebagai pekerja dalam rumah tangga atau domestik.

Narwoko dan Suyanto, (2014) mengungkapkan bahwa perbedaan gender antara kaum laki dan kaum perempuan terjadi dalam waktu yang sangat panjang dan merupakan ketentuan Tuhan atau suatu kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi konstruksi sosial gender yang diharapkan akan mempengaruhi perkembangan fisik dari tiap jenis kelamin, contohnya gender kaum laki harus menjadi kuat, dan lewat konstruksi sosial demikian menjadikan kaum pria menjadi kuat dan besar. Selanjutnya Hermawati, (2018) menyatakan bahwa pada awalnya muncul stereotif tentang kaum perempuan sebagai makhluk yang lemah dan sebaliknya laki-laki adalah makhluk yang kuat dan tegar, walaupun pada akhirnya stereotif tersebut terpatahkan seiring perkembangan jaman.

Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, (2019) menerangkan bahwa gender adalah Suatu sifat yang tertanam pada diri laki-laki dan perempuan yang didesain baik secara sosial maupun budaya dan seharusnya kondisi perbedaan gender tidak menjadi problem jika konsep kesetaraan gender dan keadilan dilaksanakan secara baik. Lanjutnya bahwa ketidakadilan gender sebagai suatu bentuk segregasi tatanan ketidakadilan yang berasal dari ketidakadilan gender.

Merujuk pada apa yang diungkapkan oleh Fakih tentang budaya, maka antara permasalahan gender dan kebudayaan adalah dua entitas yang tak terpisahkan, kondisi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebudayaan adalah merupakan bagian dari nilai sosial yang dihasilkan dari unsur rasa pada kelompok masyarakat tentang apa yang baik serta apa yang salah meskipun mengenai baik buruk dan benar salah sangat relatif sifatnya.

Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yang berusaha untuk mengetahui dan mendalami realitas masalah marginalisasi terhadap kaum perempuan Nuaulu di Nuanea, dimana masih ditemukan adanya perempuan Nuaulu di Nuanea yang menikah di usia dini, kondisi demikian membawa dampak yang besar terhadap kaum perempuan untuk dapat bergerak maju seperti halnya kaum laki-laki, dan pada segi

lain telah ada perempuan Nuaulu yang sudah mengenyam pendidikan sampai ke dunia pendidikan tinggi yang ada di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan telaah kepustakaan.

Dalam rangka menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan metode yang diungkapkan oleh Maleong, (2005) yakni metode *snowballing* (bola salju) yaitu berdasarkan informasi dari orang pertama yang dijumpai ditempat penelitian yang kemudian akan menunjuk siapa saja yang dapat peneliti wawancarai atau dapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian, sehingga dijumpai 14 informan yang terdiri dari kepala pemerintahan negeri atau raja, tokoh adat, tokoh pada lembaga pendidikan, wanita yang sudah menikah pada usia sangat muda (dini) dan wanita yang sementara mengenyam pendidikan pada jenjang strata satu. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang utuh berdasarkan kenyataan lapangan yaitu melalui langkah reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pandangan Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu di NuaNea

Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu objek ataupun suatu masalah, kondisi demikian menyebabkan adanya pengaruh tertentu terhadap objek dimaksud. Terkait dengan Kaum Perempuan dimana cara pandang terhadap kaum pemimis ini selalu saja menjadi perhatian dan problematika tersendiri dari para pemerhati bahkan peneliti sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan terdiri dari beragam masalah, hal ini disebabkan oleh adanya sudut pandang yang bias gender yang ditujukan kepada mereka sehingga menyebabkan tidak tersedianya ruang gerak yang bebas seperti halnya kaum laki-laki dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang lebih bersifat domestik. Kondisi ini juga dialami oleh perempuan Nuaulu dimana mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Salah satu permasalahan yang sampai sekarang dihadapi oleh wanita Nuaulu di Nuanea dan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan perkawinan di usia dini.

Dengan adanya kejadian-kejadian pernikahan dini sebagai akibat dari tradisi dan budaya yang dianut oleh orang Nuaulu, menunjukkan kaum perempuan Nuaulu di Negeri Nuanea termarginalisasi, dimana mereka harus rela melakukan pernikahan di usia dini, sementara pada tempat lain sebagian perempuan Nuaulu di Nuanea juga telah berupaya untuk mengenyam pendidikan sampai ke dunia pendidikan tinggi ketimbang harus menikah di usia dini.

Terkait dengan Masih terdapatnya Anak perempuan Nuaulu yang menikah di usia dini maka oleh Bapak Raja Nuanea yakni bapak Sahune Matoke, (55 tahun) menerangkan bahwa;

"Jika dilihat dari sejarah katong (kita) orang Nuaulu terutama yang berada di negeri Nuanea maka dari dulu sampai sekarang katorang (kita) masih mempraktekan perkawinan usia muda bagi katong pung anak-anak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kebiasaan yang selama ini terjadi. Artinya ketika katong pung anak-anak selesai pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan belum selesai Sekolah SMP lai dorang sudah harus menikah, tapi masih juga ada katong pung anak-anak yang lain baik itu laki-laki terutama anak perempuan yang sudah sekolah sampai ke Perguruan Tinggi yang ada di kota Masohi. Jadi hal ini tergantung bagi katong pung orang tua (orang tua) disini apakah dorang (mereka) mau menyekolahkan anak-anak ataukah harus mengikuti kebiasaan katong dengan menikahkan anak mereka di usia yang masih sangat muda".

Pernyataan Raja Negeri Nuanea bapak Sahune Matoke mengawali wawancara dengan peneliti menunjukkan bahwa masih ada anak-anak terutama anak perempuan yang menikah dibawah umur atau menikah di usia yang masih sangat muda yakni ketika mereka tamat Sekolah Dasar ataupun belum sampai menyelesaikan pendidikan SMP. Dengan menikahnya anak perempuan di usia dini menunjukkan adanya pandangan yang bias gender (mengutamakan salah satu jenis kelamin) dari para orang tua terhadap anak anak perempuan mereka dimana mereka dianggap bisa berumah tangga dan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan lagi. Tetapi dibalik pandangan demikian Sahune juga menjelaskan bahwa semua juga tergantung kepada orang tua dari masing-masing anak apakah harus mengikuti kebiasaan ataukah harus menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kota Masohi.

Bapak Tuale Matoke, (35 tahun) yang adalah tokoh Adat Nuanea pada tempat yang terpisah menyatakan pemikirannya kepada peneliti terkait persoalan pernikahan dini anak Nuaulu menyatakan bahwa;

“Biarpun Status atau kedudukan perempuan Nuaulu lebih rendah dibawa laki-laki, tapi dalam kaitanya dengan perkawinan saat dong masih muda dari dolo sampe sakarang masih katong lia dan ini tarus saja terjadi karena katong pung anak perempuan disini banyak yang seng abis sekolah baik SD ataupun SMP karena sudah menjadi kebiasaan dimana dorang harus kawin dengan laki-laki yang juga putus sekolah”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya permasalahan marginalisasi yang beragam yang dihadapi oleh perempuan nuaulu sebagai contohnya adalah kedudukan kaum perempuan Nuaulu lebih rendah dibawah laki-laki, kenyataan putus sekolah yang harus dihadapi dan mereka harus menikah pada usia yang masih sangat muda.

Untuk mempermudah kita memahami lebih jauh tentang pandangan orang Nuaulu terhadap anak perempuan yang menyebabkan mereka harus menikah di usia yang muda (pernikahan dini) maka dapatlah ditelusuri melalui indikator berikut;

1. Wanita Nuaulu sebagai Harta

Anak bagi semua orang adalah harta yang tak terhingga, demikian pula bagi orang Nuaulu anak adalah harta tak terhingga yang adalah pemberian dari yang maha Kuasa (Inapuhum Ama Laha Talla), yang kelak nanti akan sangat membantu orang tua dalam mengusahakan kehidupan keluarga. Misalnya menolong orang tua untuk bersama-sama anak laki laki mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan untuk berkebun, menangkap ikan dan udang di kali (sungai) dan pekerjaan rumah lainnya sedangkan bagi anak perempuan bersama ibunya melakukan pekerjaan membuat anyaman dari rotan ataupun dari bambu dan memasak di dapur.

Jadi sesungguhnya memiliki anak perempuan berarti memiliki harta yang dapat membantu orang tua. Perempuan sebagai harta ini akan terlihat ketika anak perempuan Nuaulu dinikahkan dengan seorang laki-laki, seperti yang ungkapkan oleh Nobena Hury, (45 tahun) seorang perempuan Nuaulu yang menikah di usia yang sangat muda, menurutnya bahwa:

“Waktu beta kawin itu usia beta masih sangat muda yaitu kurang lebih 13 tahun. Beta (saya) dikawinkan karena alasan beta pung orang tua supaya bisa bantu dorang. Artinya kalau beta sudah kawin dan punya suami berarti beta ada pegang uang yang diberikan oleh beta pung laki (suami), sehingga ketika beta punya orang tua seng (tidak) ada uang dan dorang minta bantu maka beta bisa bantu meringankan dorang punya susah”.

Pernyataan diatas sesungguhnya ada secercah harapan orang tua terhadap anak perempuan mereka, dimana dengan mengawinkan mereka pada usia muda maka sebagai orang tua akan diuntungkan karena dapat membantu mereka ketika dibutuhkan dari pada harus menyekolahkan mereka. Kalau kita telaah lebih jauh tentang harapan yang tertumpuk pada anak perempuan tersebut terlihat adanya proses marginalisasi yang terjadi. Santi Sounawe, (40 tahun) yang juga pernah merasakan marginalisasi yang menikah di usia 14 tahun, menyatakan bahwa;

"Kawin di usia dini bagi katong orang Nuaulu bukan merupakan hal baru tapi sudah terjadi dari katong pung orang tua dolo-dolo (dulu-dulu), katong kawin muda disebabkan oleh adanya harapan orang tua untuk bisa katong bantu dan juga karena banyak dari katong yang putus sekolah sehingga akhirnya di nikahkan oleh orang tua, dan bagi katong orang Nuaulu pada usia demikian katong sudah bisa di nikahkan dengan laki-laki yang menjadi jodoh dari orang tua".

Lebih jauh Tatuna Sounawe, (47 tahun) yang juga mengalami hal serupa dengan Santi Sounawe mengungkapkan bahwa;

"Beta menikah di usia muda terpaksa dilakukan oleh orang tua bukan karena beta putus sekolah seperti teman-teman perempuan yang lain, tetapi adanya harapan bahwa ketika beta menikah maka beta sudah dapat bekerja untuk mencari uang yang bukan saja untuk keperluan beta dengan suami tapi juga bisa membantu orang tua yang hidupnya susah bahkan untuk menyambung hidup dorang harus berhutang".

Pernyataan dari kedua informan diatas mengandung arti bahwa praktek pernikahan dini yang terjadi di Nuaulu Nuanea, sudah berlangsung dalam waktu yang panjang dengan motif yang hampir sama yakni karena mereka harus membantu meringankan beban orang tua yang hidup dalam kesusahan secara ekonomi, bahkan ada yang rela untuk meninggalkan bangku pendidikan untuk melakukan pernikahan dengan lelaki yang menjadi jodohnya. Kondisi ini menunjukkan betapa mirisnya nasib dari perempuan Nuaulu, yang kalau dilihat sangat mirip dengan perempuan dibelahan dunia lain misalnya yang dialami oleh perempuan di Lebanon seperti yang diungkapkan oleh Dudley Kirk, dimana perempuan di Lebanon juga dinikahkan pada usia yang sangat muda dengan motifasi untuk membantu perekonomian keluarga. Kirk lebih jauh menerangkan bahwa perempuan Lebanon dinikahkan pada usia yang masih sangat

muda dengan berbagai alasan, keadaan ini lebih banyak dialami oleh masyarakat pertanian yang hidupnya masih berpegang teguh pada ajaran leluhur yang masih kuno, dengan tingkat pendidikan perempuan yang relatif masih rendah, (Kirk Dudley, 1976).

2. Perjodohan Anak Perempuan Nuaulu

Dalam kehidupan umat manusia seiring dengan keyakinan setiap orang tentang calon suami ataupun isteri yang menjadi pendampingnya bahwa soal jodoh ada dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan yang menentukan jodoh bagi masing-masing orang. Namun dalam konteks kebudayaan masih banyak suku-suku bangsa di Indonesia yang mempraktekan kebiasaan perjodohan bagi anak-anak mereka, satu diantaranya adalah suku Nuaulu di Nuanea kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah, seperti yang diungkapkan oleh Ollen Peirissa, (41 tahun) bahwa;

"Katong punya suatu kebiasaan disini dimana katong pung (punya) orang tatua suka menjodohkan katong katika katong masih kecil dan itu dong lakukan secara diam-diam tanpa katong tahu, yang baru katong tau saat katong sudah ada di kelas 6 SD, jadi pas (saat) lulus Sekolah Dasar katong sudah bisa dikasi kawin dengan calon suami yang jadi pilihan orang tua".

Ditempat terpisah Halimah Sounawe, (36 tahun) adalah seorang perempuan Nuaulu yang menikah diusia muda dengan suami sebagai hasil perjodohan orang tua sejak mereka masih kecil, menurutnya;

"Selama ini banyak dari perempuan Nuaulu kawin dalam usia dini dan selalu dijodohkan oleh orang tua, jadi ketika katong dapat haid pertama pada saat masih SD kira-kira saat katong duduk di kelas 5 dan 6, langsung katong di Pinamoukan (upacara adat pendewasaan anak), jadi walaupun katong masih ana-ana (anak-anak) tapi dalam adat Nuaulu katong sudah dianggap dewasa dan sudah bisa kawin".

Pernyataan dari kedua informan mengandung pengertian adanya suatu kebiasaan dari orang tua di Nuaulu Nuanea, dimana anak-anak selalu dijodohkan sejak mereka masih kecil tanpa mereka mengetahuinya dan ketika mereka mendapat haid pertama oleh lembaga adat mereka kemudian di Pinamoukan atau upacara pendewasaan bagi anak perempuan, walaupun mereka masih anak-anak tapi secara adat mereka dianggap sudah dewasa dan sudah bisa membentuk rumah tangga baru dengan jodoh yang sudah ditetapkan. Dalam pengamatan peneliti kondisi ini terbentuk sebagai akibat dari kebudayaan yang mereka anut, sedangkan disisi yang lain rendahnya tingkat pendidikan orang tua, bahkan diantara

orang tua ada yang tidak pernah mengenal bangku pendidikan sehingga berpengaruh terhadap cakrawala berpikir.

Faktor kebudayaan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak perempuan Nuaulu menjadi indikasi terjadinya perjodohan dan bahkan pernikahan dini, kondisi ini sejalan dengan pendapat Wollstonecraft yang menyatakan bahwa rendahnya intelektual wanita terjadi akibat dari rendahnya mutu pendidikan yang di hasilkan dari kesempatan yang tak merata. Dimana dengan rendahnya tingkat pendidikan ini maka akan sangat berpengaruh pada cakrawala berpikir seseorang terhadap suatu masalah termasuk upaya menikahkan anak perempuan pada usia yang sangat dini, sehingga anak-anak menjadi korban. Kondisi ini dialami oleh Lina Sounawe, (34 tahun) menurutnya bahwa;

"Pada umumnya katong di Nuanea ini rata-rata tingkat pendidikan dari orang tua sangat rendah bahkan banyak dari mereka yang tidak sekolah, sehingga dorang punya pikiran akang sempit, akhirnya sejak beta kecil lai (lagi) sudah dijodohkan kemudian beta dikawinkan saat lulus SD sampe (sampai) beta tidak bisa lanjut sekolah ke SMP".

Kondisi diatas menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian tiap orang dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Nuanea mengakibatkan banyak terjadi marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu, dimana anak perempuan harus dinikahkan pada usia dini yang tentu sangat bertolak belakang dengan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada pasal 7 ayat 1 diamanatkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Hal ini berarti kebiasaan pernikahan dini yang terjadi pada tempat penelitian bertentangan dengan regulasi tersebut.

Menempuh Pendidikan Sebagai Upaya Perempuan Nuaulu di Nuanea Terhindar dari Pernikahan Dini.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian dan karakter setiap orang, terutama bagi kaum perempuan yang ingin maju dan berkembang, terkhusus perempuan Nuaulu di Nuanea yang hanya dianggap sekedar sebagai pekerja di dapur, tapi dewasa ini mereka lalu berupaya untuk lebih maju sama dengan perempuan lainnya.

Tetty Yukesti, (2015) menjelaskan bahwa awalnya dunia kaum perempuan hanyalah selebar daun kelor, urgensinya kehidupan mereka hanya pada lingkup kasur, dapur dan sumur. Sebagai kasur artinya perempuan hanya sebagai teman suami ditempat tidur dan dapur diibaratkan sebagai kantornya kaum perempuan sejak ayam berkokok (pagi-pagi buta) sebagai sumur yang letaknya dibelakang rumah mengandung makna dalam bahasa Jawa yang disebut Konco Winking atau teman dibelakang, pernyataan ini diperkuat oleh ungkapan dalam bahasa Sunda sebagai "batur sakasur, sadapur sasumur yang berarti perempuan sebagai orang rumah. Lanjutnya terdapat stereotif yang menempatkan kaum perempuan dibawah dominasi laki-laki. Kondisi ini turut dirasakan perempuan Nuaulu, namun timbul kesadaran mereka untuk harus maju yang berorientasi tentang kehidupan mereka diwaktu yang akan datang dimana lewat bangku pendidikan mereka lalu berupaya untuk maju keluar dari ketertinggalan yang selama ini dialami.

Terdapat anggapan bahwa hidup itu baik dan hidup itu buruk tapi bagaimana dari keburukan itu setiap orang berusaha untuk membuat hidup itu lebih baik, seperti yang dikisahkan oleh beberapa perempuan Nuaulu yang menceritakan tentang bagaimana lewat pendidikan mereka berusaha untuk merubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik, tanpa merubah kodratnya sebagai perempuan seperti yang diungkapkan oleh Rachel Sounawe, (18 tahun) adalah seorang yang telah menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ada di kota Masohi, mengungkapkan bahwa;

"Beta tidak mau sama dengan perempuan Nuaulu lainnya, hal ini beta ungkapkan buat beta punya papa, beta tetap harus sekolah supaya hidup esok lusa bisa sanang (senang), beta harus maju sama dengan perempuan lain yang bisa sekolah sampe Perguruan Tinggi jadi bapa musti usaha buat beta sekolah".

Selanjutnya Fatima Peirissa, (19 tahun) berpendapat seirama dengan Rachel bahwa;

"Hanya dengan pendidikan saja katong perempuan Nuaulu bisa berkembang sama dengan laki-laki, bahkan ketika mau dinikahkan beta menolak, karena beta tidak mau nasib sama dengan teman-teman perempuan lain yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena sudah kawin".

Pernyataan dari kedua informan mengandung arti bahwa adanya suatu kemajuan dari sudut pandang mereka, dimana keterpurukan kehidupan yang dialami oleh perempuan Nuaulu lainnya yang putus sekolah, kemudian harus mengikuti kemauan adat dan orang

tua sehingga harus menikah di usia dini, seakan menjadi cambuk untuk memicu semangat untuk maju bahkan menolak untuk dinikahkan pada usia dini.

Kegigihan perempuan Nuaulu untuk berkembang dengan tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, tetapi untuk sekarang mereka harus maju untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Hal ini mengingatkan kita pada Herbert Spencer yang mencoba untuk memperjuangkan hak-hak *Laissez Faire* bagi kaum perempuan dengan pernyataan bahwa sifat-sifat alamiah perempuan tidaklah tetap dan abadi tetapi mereka juga memiliki hak untuk bersaing dengan laki-laki.

Upaya perempuan Nuaulu untuk lepas dari marginalisasi yang dialami oleh mereka juga dikemukakan oleh Houwa Peirissa, (20 tahun) yang adalah seorang mahasiswa pada Perguruan Tinggi di kota Masohi bahwa;

"Sekarang dunia sudah terang dan sudah semakin maju, orang perempuan disemua tempat sudah berlomba untuk sekolah, lalu kenapa katong perempuan Nuaulu seng (tidak) bisa sama dengan mereka, keadaan inilah yang mendorong beta dengan teman untuk terus bersekolah agar hidop esok lusa jadi lebih baik".

Sementara itu Pinaita Nahatue, (20 tahun) yang adalah mahasiswa di kota Masohi mengungkapkan bahwa;

"Beta bisa sekolah seperti ini karena beta seng pernah keluar malam guna menghindari sesuatu hal yang tidak baik (hamil) yang menyebabkan harus putus sekolah, karena beta punya keinginan untuk harus sekolah guna mengangkat orang tua pung muka".

Pernyataan kedua informan ini mengandung arti bahwa adanya semangat perempuan Nuaulu di Nuanea untuk maju mengikuti perkembangan dunia dan disisi yang lain untuk dapat mencapai masa depan yang baik mereka lalu berupaya lewat kiat-kiat khusus agar terhindar dari kehamilan yang menyebabkan mereka harus menikah diusia dini. Namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya kasus kehamilan dini yang menyebabkan anak perempuan Nuaulu di Nua Nea Harus menikah di usia dini, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Tuale Matoke, S.Sos, (35 tahun) yang menyatakan bahwa;

"Memang kehamilan di luar Nikah bagi kita orang Nuaulu merupakan sesuatu hal yang sangat tabu dan sangat jarang terjadi Nua Nea, Namun tidak berarti hal ini tidak pernah terjadi, karena itu anak-anak selalu kita ajarkan dan kita didik agar sedapat mungkin menghindari kejadian hamil diluar nikah karena akan membuat malu keluarga".

Lebih jauh untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti lalu meminta pendapat dari dua tokoh pendidikan yang berada di Nuanea terkait dengan permasalahan penelitian yakni bapak Benedictus Loe, (45 tahun) menyatakan bahwa;

"Pada kenyataannya memang masih terdapat anak perempuan Nuaulu yang menikah di usia dini namun juga sudah banyak perempuan Nuaulu yang mengenyam pendidikan sampai dunia pendidikan tinggi sama dengan kaum perempuan lainnya disekitar mereka dan ini merupakan suatu langkah maju, karena dengan majunya Sumber Daya Manusia (SDM) maka Negeri Nuanea dapat berkembang seiring perkembangan negeri lainnya di pulau Seram".

Pemikiran yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Salmont Mat Sopalatu, (51 tahun) kepala sekolah satu atap, mengungkapkan bahwa;

"Saya kira satu hal penting yang bisa membawa orang Nuaulu keluar dari keteringgalan dan kebiasaan kawin di usia muda adalah bagaimana memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka lewat institusi pendidikan, jadi orang Nuaulu baik laki maupun perempuan harus terus bersekolah sampai dunia pendidikan tinggi".

Pernyataan yang dikemukakan diatas sesungguhnya memberi arti bahwa pendidikan merupakan kunci sukses seseorang untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi terutama oleh perempuan Nuaulu, dimana lewat pendidikan mereka akan terbebas dari pernikahan dini dan marginalisasi yang selama ini membelunggu kehidupan perempuan Nuaulu di Nuanea.

Penutup

Kesimpulan

Bertolak dari penjelasan dan uraian diatas dapatlah disimpulkan beberapa aspek penting terkait dengan temuan hasil penelitian antara lain sebagai berikut; Perkawinan dini yang terjadi di negeri administratif Nuanea sampai saat ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor budaya masyarakat setempat yang menempatkan perempuan pada status yang lebih rendah dan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga turut mempengaruhi pola pikir mereka. Selanjutnya bahwa bentuk marginalisasi yang dialami oleh perempuan Nuaulu Nuanea adalah seperti anak sebagai harta, dimana ketika mereka menikah maka dapat membantu menanggulangi kesulitan hidup dari orang

tua, serta kebiasaan menjodohkan anak sejak mereka masih kecil dan pada saat mereka sudah mendapat haid pertama dan di Pinamoukan maka mereka sudah dianggap dewasa dan boleh menikah dan jodoh yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Temuan terakhir bahwa pendidikan merupakan senjata atau perisai yang paling ampuh untuk menghindarkan diri dari perkawinan dini yang selalu terjadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapatlah diajukan saran antara lain sebagai berikut bahwa perlunya kegiatan riil (seperti lebih memberikan kesempatan kepada anak perempuan Nuaulu untuk bersekolah sampai ke dunia pendidikan tinggi, selain itu perlunya diberikan pemahaman terhadap orang tua di Nuanea bahwa semua anak mempunyai hak yang sama terutama pada bidang pendidikan) untuk menghilangkan marginalisasi terhadap kaum perempuan dengan tanpa merusak tatanan budaya yang sudah ada. Selanjutnya bahwa orang Nuaulu di Nua Nea perlu diberikan akses yang luas, melalui interaksi dengan dunia luar, karena masyarakat Nuaulu pada awalnya mempunyai sifat yang sangat tertutup terhadap dunia luar, sehingga dengan demikian akan sangat membantu merubah paradigma marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu yang berujung pada perkawinan dini.

Daftar Pustaka

- Aas Nurashiah Barokah dan Yessy Hermawati. (2019). Konsep Diri Perempuan Bali Melawan Patriarki dalam Novel Tempurung. *Nusa*, 14(2), 262–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.262-272>
- Anis Maswoni. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 9(1), 15–18. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/3364/2494>
- Arifin, M. H. (2017). *Memahami Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia*. 22(2), 139–158. <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i2.7697>
- Davis Kingsley dan Judith Blake. (1956). Social Structure and Fertility: An Analytic Framework. *Economic Development and Cultural Change*, 4(3), 211–235. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1151774>
- Febrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Lombok Timur NTB)* (Ndari Pengesti, ed.). Retrieved from

- <https://en.id1lib.org/dl/18252437/b5589a>
- Ghufran, M., Kordi, H., Lusia, K., Muhammad, P., & Ramli, T. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. In Cetakan Pertama (Ed.), *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Retrieved from www.batukarinfo.com
- Hermawati, W. (2018). *Gender Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, & Tantangannya Di Indonesia* (Cetakan Pe). Retrieved from <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1521570363.pdf>
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore. (2002). *A Sociology of Women* (Cetakan ke). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=6680>
- Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15. Retrieved from <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/8>
- Kirk Dudley. (1976). *Factors Affecting Moslem Natality dalam Family Planning and Population Program*. Chicago: Chicago University of Chicago Press.
- Maleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Jaya.
- More L. Hendrietta. (1998). *Feminisme dan Antropolog*. Retrieved from <http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/140004646/>
- Narwoko dan Suyanto. (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cetakan 8). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=8707>
- Nina Johan. (2012). *Perempuan Nuaulu Tradisionalisme dan Kultur Patriarki* (Ed.1, Cet.). Retrieved from http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1826
- Sastrawati, N. (2018). Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda, Analisis Gender dan Politik Perspektif Post feminisme. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Cetakan Pertama). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis8cb-qLr3AhXCR2wGHX0RCR8QFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Frepositori.uin-alauddin.ac.id%2F12634%2F&usq=AOvVaw1ycKYQpaIf-1JGGKcCdoMp>